

LAPORAN KEUANGAN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
(AUDITED)

Jalan Ciumbuleuit No.2 Bandung - 40132
(022) 2031044 - 2031045
<http://disdukcapil.jabarprov.go.id>
dukcapil@jabarprov.go.id

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pimpinan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Perangkat Daerah meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2025 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.
2. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan.
3. Laporan Operasional menunjukkan informasi Pendapatan-LO dan Beban.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/(Defisit)-LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.
5. Catatan atas Laporan Keuangan memberikan uraian tentang kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun 2025 ini masih belum

sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bandung, 26 Mei 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19661020 199803 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran.....	v
Pernyataan Tanggung Jawab.....	vi
Ringkasan.....	vii
Laporan Realisasi Anggaran.....	vii
Neraca.....	viii
Laporan Operasional	ix
Laporan Perubahan Ekuitas.....	ix
Catatan atas Laporan Keuangan.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.3 Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi.....	2
1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	3
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN STRATEGIS, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	6
2.1 Ekonomi Makro	6
2.2 Kebijakan Strategis	6
2.3 Kebijakan Keuangan	8
2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	9
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	11
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD	11
3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	12
3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.....	13
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	14
4.1 Entitas Akuntansi.....	14
4.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	15
4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	16

	4.4	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	17
	4.5	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP	28
BAB	V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	29
	5.1	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	29
	5.1.1	Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	29
	5.1.2	Penjelasan per Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	30
	5.1.3	Catatan Penting Lainnya	40
	5.2	Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	41
	5.2.1	Penjelasan Umum Neraca.....	41
	5.2.2	Penjelasan per Pos Neraca.....	41
	5.2.3	Catatan Penting Lainnya	47
	5.3	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	48
	5.3.1	Penjelasan Umum Laporan Operasional	48
	5.3.2	Penjelasan per Pos Laporan Operasional	48
	5.3.3	Catatan Penting Lainnya	52
	5.4	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	53
	5.4.1	Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas	53
	5.4.2	Penjelasan per Pos Laporan Perubahan Ekuitas	54
	5.4.3	Catatan Penting Lainnya	56
BAB	VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN PD	57
BAB	VII	PENUTUP	60

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Rincian LRA
Lampiran	4	Daftar Persediaan
Lampiran	5	Daftar Saldo Persediaan
Lampiran	6	Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
Lampiran	7	Daftar Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
Lampiran	9	Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Daerah
Lampiran	14	Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca – Perhitungan Beban Pegawai, Pemeliharaan, Perjalanan Dinas, Hibah, Bantuan Sosial, dan Lain-lain
Lampiran	15	Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca – Perhitungan Beban Persediaan
Lampiran	16	Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca – Perhitungan Beban Penyisihan dan Beban Penyusutan
Lampiran	17	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Neraca dan LRA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Neraca; (c) Laporan Operasional (LO); (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bandung, 26 Mei 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19661020 199803 1 003



PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	14.034.884.163	13.478.789.125,00	96,04	16.091.638.279,00
5.1	BELANJA OPERASI	13.662.218.051	13.136.877.642,00	96,15	14.767.326.279,00
5.1.01	Belanja Pegawai	9.533.657.478	9.185.247.054,00	96,35	9.401.713.862,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.128.560.573	3.951.630.588,00	95,71	5.365.612.417,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	13.662.218.051	13.136.877.642,00	96,15	0,00
5.2	BELANJA MODAL	372.666.112	341.911.483,00	91,75	1.324.312.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	372.666.112	341.911.483,00	91,75	1.324.312.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	372.666.112	341.911.483,00	91,75	0,00
	JUMLAH BELANJA	14.034.884.163	13.478.789.125,00	96,04	16.091.638.279,00
	SURPLUS/DEFISIT	-14.034.884.163	-13.478.789.125,00	96,04	-16.091.638.279,00

Bandung, 26 Mei 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT


dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.
NIP. 19661020 199803 1 003

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Neraca

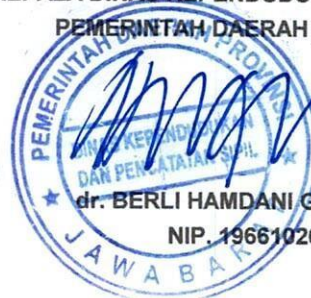
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	7.047.036.446,00	7.349.138.617,00
1.1	ASET LANCAR	13.942.945,00	16.853.850,00
1.1.12	Persediaan	13.942.945,00	16.853.850,00
	JUMLAH ASET LANCAR	13.942.945,00	16.853.850,00
1.3	ASET TETAP	7.033.093.501,00	7.332.284.767,00
1.3.01	Tanah	5.138.640.000,00	5.138.640.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	9.685.930.902,00	9.327.823.834,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	5.354.291.538,00	5.354.291.538,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.202.000,00	67.202.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(13.212.970.939,00)	(12.555.672.605,00)
	JUMLAH ASET TETAP	7.033.093.501,00	7.332.284.767,00
1.5	ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	7.047.036.446,00	7.349.138.617,00
2	KEWAJIBAN	6.012.815,00	7.723.742,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.012.815,00	7.723.742,00
2.1.06	Utang Belanja	6.012.815,00	7.723.742,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.012.815,00	7.723.742,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	6.012.815,00	7.723.742,00
3	EKUITAS	7.041.023.630,99	7.341.414.874,99
3.1	EKUITAS	7.041.023.630,99	7.341.414.874,99
3.1.01	Ekuitas	(6.437.765.494,01)	(8.782.033.404,01)
3.1.02	Ekuitas SAL	0,00	0,00
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	13.478.789.125,00	16.123.448.279,00
	JUMLAH EKUITAS	7.041.023.630,99	7.341.414.874,99
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7.047.036.445,99	7.349.138.616,99

Bandung, 26 Mei 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.

NIP. 19661020 199803 1 003



PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	13.779.180.369,00	15.283.691.799,00	(1.504.511.430,00)	(9,84)
8.1	BEBAN OPERASI	13.121.882.035,00	14.765.222.990,00	(1.643.340.955,00)	(11,13)
8.1.01	Beban Pegawai	9.185.247.054,00	9.401.713.862,00	(216.466.808,00)	(2,30)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	3.936.634.981,00	5.363.509.128,00	(1.426.874.147,00)	(26,60)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	13.121.882.035,00	14.765.222.990,00	(1.643.340.955,00)	(11,13)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	657.298.334,00	518.468.809,00	138.829.525,00	26,78
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	657.298.334,00	518.468.809,00	138.829.525,00	26,78
	JUMLAH BEBAN	13.779.180.369,00	15.283.691.799,00	(1.504.511.430,00)	(9,84)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(13.779.180.369,00)	(15.283.691.799,00)	1.504.511.430,00	(9,84)

Bandung, 26 Mei 2026
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT


dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.
NIP. 19861020 199803 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	7.341.414.874,99	6.501.658.394,99
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(13.779.180.369,00)	(15.283.691.799,00)
RK PPKD	13.478.789.125,00	16.123.448.279,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	7.041.023.630,99	7.341.414.874,99

Bandung, 26 Mei 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT


dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.
NIP. 19661020 199803 1 003

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 31 Dec 2025 (Audited)	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 31 Dec 2024 (Audited)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6 = 4 / 3	7
5.1	Belanja Operasi	13.662.218.051,00	13.136.877.642,00	(525.340.409,00)	96,15	14.767.326.279,00
5.1.01	Belanja Pegawai	9.533.657.478,00	9.185.247.054,00	(348.410.424,00)	96,35	9.401.713.862,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.128.560.573,00	3.951.630.588,00	(176.929.985,00)	95,71	5.365.612.417,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Belanja Modal	372.666.112,00	341.911.483,00	(30.754.629,00)	91,75	1.324.312.000,00
5.2.01	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	372.666.112,00	341.911.483,00	(30.754.629,00)	91,75	1.324.312.000,00
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jumlah Belanja	14.034.884.163,00	13.478.789.125,00	(556.095.038,00)	96,04	16.091.638.279,00
	SURPLUS / (DEFISIT) - LRA	-14.034.884.163,00	-13.478.789.125,00	556.095.038,00		-16.091.638.279,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-14.034.884.163,00	-13.478.789.125,00	556.095.038,00		-16.091.638.279,00

Bandung, 26 Mei 2026
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT


dr. BERLI HAMDANI, GELUNG SAKTI, MPPM.
NIP. 19661020 199803 1 003

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2025

No	Uraian	Ref	2025 (Audited)	2024 (Audited)
1	2	3	4	5
1	ASET			
1.1	ASET LANCAR			
1.1.1	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
	Kas di BLUD		0,00	0,00
	Kas BOS		0,00	0,00
1.1.3	Piutang Pajak Daerah		0,00	0,00
1.1.4	Piutang Retribusi Daerah		0,00	0,00
1.1.5	Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		0,00	0,00
1.1.7	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
1.1.8	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
1.1.9	Bagian Lancar Piutang Sewa		0,00	0,00
1.1.10	Piutang Lain-lain		0,00	0,00
1.1.11	Penyisihan Piutang		0,00	0,00
1.1.12	Beban Dibayar Dimuka		0,00	0,00
1.1.13	Persediaan		13.942.945,00	16.853.850,00
	Jumlah Aset Lancar		13.942.945,00	16.853.850,00
1.2	ASET TETAP			
1.2.1	Tanah		5.138.640.000,00	5.138.640.000,00
1.2.2	Peralatan dan Mesin		9.685.930.902,00	9.327.823.834,00
1.2.3	Gedung dan Bangunan		5.354.291.538,00	5.354.291.538,00
1.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		67.202.000,00	67.202.000,00
1.2.5	Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
1.2.6	Konstruksi dalam Pengerjaan		0,00	0,00
1.2.7	Akumulasi Penyusutan		-13.212.970.939,00	-12.555.672.605,00
	Jumlah Aset Tetap		7.033.093.501,00	7.332.284.767,00
1.3	ASET LAINNYA			
	Jumlah Aset Lainnya		0,00	0
	JUMLAH ASET		7.047.036.446,00	7.349.138.617,00
2	KEWAJIBAN			
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
2.1.3	Utang Belanja		6.012.815,00	7.723.742,00
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		6.012.815,00	7.723.742,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		6.012.815,00	7.723.742,00
3	EKUITAS		7.041.023.631,00	7.341.414.875,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.047.036.446,00	7.349.138.617,00

Bandung, 26 Mei 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT


dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.
NIP. 19661020 199803 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN ANGGARAN 2025 (AUDITED)	TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7= (6/5)x100%
II	BEBAN					
II.1	BEBAN OPERASI	5.4.2.2				
	Beban Pegawai	5.4.2.2.1	9.185.247.054,00	9.401.713.862,00	-216.466.808,00	-2,30
	Beban Persediaan	5.4.2.2.2	681.591.342,00	455.289.469,00	226.301.873,00	49,71
	Beban Jasa	5.4.2.2.3	2.130.103.049,00	1.972.966.631,00	157.136.418,00	7,96
	Beban Pemeliharaan	5.4.2.2.4	301.528.889,00	239.174.190,00	62.354.699,00	26,07
	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.2.5	809.850.141,00	2.693.823.838,00	-1.883.973.697,00	-69,94
	Beban Bunga	5.4.2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Subsidi	5.4.2.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Hibah	5.4.2.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.2.10	657.298.334,00	518.468.809,00	138.829.525,00	26,78
	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Transfer	5.4.2.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Lain-lain	5.4.2.2.13	13.561.560,00	2.255.000,00	11.306.560,00	501,40
	Jumlah Beban Operasi		13.779.180.369,00	15.283.691.799,00	-1.504.511.430,00	-9,84
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.4.2.3	-13.779.180.369,00	-15.283.691.799,00	1.504.511.430,00	-9,84
II.2	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.2.4				
	SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.2.4.1				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Surplus Non Operasional		0,00	0,00	0,00	0,00
II.3	DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.2.4.2				
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Defisit Non Operasional		0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.2.5	-13.779.180.369,00	-15.283.691.799,00	1.504.511.430,00	-9,84
III	POS LUAR BIASA	5.4.2.6				
III.1	PENDAPATAN LUAR BIASA					
	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
III.2	BEBAN LUAR BIASA					
	Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
	POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	SURPLUS/DEFISIT LO	5.4.2.7	-13.779.180.369,00	-15.283.691.799,00	1.504.511.430,00	-9,84

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Bandung, 26 Mei 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT


dr. BERLI HAMDANI/GELUNG SAKTI, MPPM.
NIP. 19661020 199803 1 003

URAIAN	AUDITED 2025	AUDITED 2024
EKUITAS AWAL	7.341.414.875	6.501.658.395
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	-13.779.180.369	-15.283.691.799
RK PPKD	13.478.789.125	16.091.638.279
RA PPKD (Nilai Perolehan)	0	31.810.000
RA PPKD (Akumulasi Penyusutan)	0	0
EKUITAS	0	0
EKUITAS AKHIR	7.041.023.631	7.341.414.875

Bandung, 26 Mei 2026
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



[Signature]
dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.
NIP. 19661020 199803 1 003

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 189 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran I.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 Audited ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun 2025 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode dari 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp13.478.789.125,00 atau mencapai 96,04 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp14.034.884.163,00 . Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp13.136.877.642,00 atau 96,15 persen dari yang dianggarkan dan Belanja Modal sebesar Rp341.911.483,00 atau 91,75 persen dari yang dianggarkan. Berdasarkan realisasi Belanja sebesar Rp13.478.789.125,00 perolehan Surplus/(Defisit)-LRA sebesar -Rp13.478.789.125,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah) :

Uraian	Tahun Anggaran 2025 (Audited)		Tahun Anggaran 2024 (Audited)	
	Anggaran Perubahan	Realisasi	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja	14.034.884.163,00	13.478.789.125,00	16.784.375.039,00	16.091.638.279,00
Belanja Operasi	13.662.218.051,00	13.136.877.642,00	15.380.018.954,00	14.767.326.279,00
Belanja Pegawai	9.533.657.478,00	9.185.247.054,00	9.803.779.152,00	9.401.713.862,00

Uraian	Tahun Anggaran 2025 (Audited)		Tahun Anggaran 2024 (Audited)	
	Anggaran Perubahan	Realisasi	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Barang dan Jasa	4.128.560.573,00	3.951.630.588,00	5.576.239.802,00	5.365.612.417,00
Belanja Modal	372.666.112,00	341.911.483,00	1.404.356.085,00	1.324.312.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	372.666.112,00	341.911.483,00	1.404.356.085,00	1.324.312.000,00
Surplus/(Defisit)-LRA	-14.034.884.163,00	-13.478.789.125,00	-16.784.375.039,00	-16.091.638.279,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.047.036.446,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp13.942.945,00 , Aset Tetap sebesar Rp7.033.093.501,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp0,00 .

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp6.012.815,00 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.041.023.631,00 .

Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 dapat disajikan pada tabel berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Aset Lancar	13.942.945,00	16.853.850,00
Aset Tetap	7.033.093.501,00	7.332.284.767,00
Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Aset	7.047.036.446,00	7.349.138.617,00
Kewajiban Jangka Pendek	6.012.815,00	7.723.742,00
Jumlah Kewajiban	6.012.815,00	7.723.742,00
Ekuitas	7.041.023.631,00	7.341.414.875,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	7.047.036.446,00	7.349.138.617,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menunjukkan kinerja sesungguhnya untuk tahun yang berakhir s.d. 31 december 2025 dan 31 december 2024 dalam Tahun Anggaran 2025. Beban Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.779.180.369,00 , Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran Rp0,00 dan Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar -Rp13.779.180.369,00 .

Ringkasan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2025 (Audited)	Tahun Anggaran 2024 (Audited)
Pendapatan-LO	0,00	0,00
Beban	13.779.180.369,00	15.283.691.799,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	-13.779.180.369,00	15.283.691.799,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/(Defisit)-LO	-13.779.180.369,00	-15.283.691.799,00

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/(defisit)-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.341.414.875,00 , Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar -Rp13.779.180.369,00 , RK PPKD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.478.789.125,00 , RA PPKD (Perolehan) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 , RA PPKD (Penyusutan) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 , Ekuitas Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 , dan Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.041.023.631,00 .

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2025 (Audited)	Tahun Anggaran 2024 (Audited)
Ekuitas Awal	7.341.414.875,00	6.501.658.395,00
Surplus/(Defisit)-LO	-13.779.180.369,00	-15.283.691.799,00
RK PPKD	13.478.789.125,00	16.091.638.279,00
RA PPKD (Perolehan)	0,00	31.810.000,00
RA PPKD (Penyusutan)	0,00	0,00
Ekuitas	0,00	0,00
Ekuitas Akhir	7.041.023.631,00	7.341.414.875,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari Pendapatan – LRA, Belanja dan Pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah. Sementara itu, dalam penyajian Laporan Operasional yang terdiri dari Pendapatan – LO dan Beban; Neraca yang terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah.

Dalam CaLK ini diungkapkan juga kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Perangkat Daerah, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan Perangkat Daerah yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, pengambilan keputusan serta menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Berbasis Akrua;
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS AKUNTANSI

Domisili dan Bentuk Hukum Entitas serta Jurisdiksi Tempat Entitas Berada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan pada tanggal 22 November 2016 beralamat di Jalan Ciumbuleuit No. 2 Telepon (022) 2031044-2031045 Fax. 2031024 Website : <http://disdukcapil.jabarprov.go.id> E-mail : dukcapil@Jabarprov.go.id Bandung – 40132.

Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan

Gubernur Jawa Barat 22 Tahun 2022 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, dengan beberapa modifikasi dan penambahan yang dianggap perlu untuk tujuan kelengkapan dalam pelaporan keuangan, sebagai berikut:

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Strategis, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Strategis
- 2.3 Kebijakan Keuangan
- 2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD
- 3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.3 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi
- 4.2 Pendekatan penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.3.1 Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.3.2 Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.3.3 Catatan Penting Lainnya
- 5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
 - 5.3.4 Penjelasan Umum Neraca
 - 5.3.5 Penjelasan Per Pos Neraca
 - 5.3.6 Catatan Penting Lainnya
- 5.3 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - 5.3.1 Penjelasan Umum Laporan Operasional
 - 5.3.2 Penjelasan Per Pos Laporan Operasional
 - 5.3.3 Catatan Penting Lainnya
- 5.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.4.1 Penjelasan Per Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.4.2 Catatan Penting Lainnya

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non-Keuangan Perangkat Daerah

Bab VII Penutup

BAB II**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN STRATEGIS, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD****2.1 EKONOMI MAKRO**

Indikator makro yang mempengaruhi perumusan strategi dan penyusunan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sasaran, indikator sasaran, dan program yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJ Perangkat Daerah) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat serta Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7
2	Program Pendaftaran Penduduk	2
3	Program Pencatatan Sipil	1
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1
JUMLAH		13

2.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Salah satu instrumen untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima adalah perumusan perencanaan strategik. Dengan perumusan perencanaan strategik yang dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan zaman dapat disikapi dengan arif dan bijak.

Perencanaan strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Visi

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah “Jawa Barat Istimewa, Lembur Diurus Kota Ditata”.

Misi

“Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*”.

Visi dan Misi diatas diterjemahkan dalam beberapa strategi yang ditempuh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat melaksanakan upaya sebagai-berikut :

1. Penyelarasan Proses Bisnis Layanan Administrasi Kependudukan Kab/Kota
2. Optimalisasi Kolaborasi antar Pemerintah Daerah;
3. Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi Disdukcapil Kab/Kota;
4. Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital;
5. Peningkatan Kualitas dan aksesibilitas Buku Profil Kependudukan;
6. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan;
7. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan;
8. Penguatan kelembagaan dan kebijakan penyelenggaraan pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan;
9. Peningkatan Kualitas Layanan dan Tata Kelola Kelembagaan;

10. Peningkatan Disdukcapil yang Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, pengambilan keputusan serta menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

2.3 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sedangkan kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 160 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Berbasis Akrual;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

2.5 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Provinsi Jawa Barat) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dibawah ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 - 2025 :

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran IKU	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil IndikatorÂ Sasaran	72,22 %

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari Perencanaan Kinerja Tahunan sangat penting dilakukan oleh Pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses dalam memberikan perspektif mengenai hal yang diinginkan untuk dihasilkan Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan Perencanaan Kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan lebih baik. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 - 2025, dan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET APBD

Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.478.789.125,00 atau 96,04 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp14.034.884.163,00 .

Rincian Belanja Tahun Anggaran 2025 berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp13.136.877.642,00 atau 96,15 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp13.662.218.051,00 , terdiri dari:
 1. Belanja Pegawai sebesar Rp9.185.247.054,00 atau 96,35 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp9.533.657.478,00 ;
 2. Belanja Barang dan jasa sebesar Rp3.951.630.588,00 atau 95,71 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp4.128.560.573,00 ;
- b. Belanja Modal sebesar Rp341.911.483,00 atau 91,75 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp372.666.112,00 , terdiri dari:
 1. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp341.911.483,00 atau 91,75 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp372.666.112,00 .

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun Anggaran 2025 (Audited)	%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%	6
1	Belanja Operasi	13.662.218.051,00	13.136.877.642,00	96,15	14.767.326.279,00
	- Belanja Pegawai	9.533.657.478,00	9.185.247.054,00	96,35	9.401.713.862,00

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun Anggaran 2025 (Audited)	%	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)
	- Belanja Barang & jasa	4.128.560.573,00	3.951.630.588,00	95,71	5.365.612.417,00
2	Belanja Modal	372.666.112,00	341.911.483,00	91,75	1.324.312.000,00
	- Belanja Peralatan dan Mesin	372.666.112,00	341.911.483,00	91,75	1.324.312.000,00
	Jumlah	14.034.884.163,00	13.478.789.125,00	96,04	16.091.638.279,00

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.091.638.279,00 , berarti realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 menurun sebesar -Rp2.612.849.154,00 atau -16,24 persen dibanding Tahun Anggaran 2024.

Realisasi penyerapan belanja pada tahun 2025 belum optimal disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Terdapat sisa anggaran dari Belanja Pegawai dikarenakan ada Jabatan yang belum terisi sampai saat ini.
2. Terdapat sisa anggaran dari Belanja Barang & Jasa hasil Negosiasi dan sisa belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.
3. Terdapat sisa anggaran dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta hasil Negosiasi.

Surplus/(Defisit)-LRA

Surplus/(Defisit)-LRA Tahun Anggaran 2025 dihasilkan dari pengurangan antara Realisasi Pendapatan-LRA dan Realisasi Belanja, yaitu Surplus/(Defisit)-LRA sebesar -Rp13.478.789.125,00.

3.2 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beban

Beban pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp13.779.180.369,00 . Rincian berdasarkan jenis beban adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2025 (Audited)	Tahun Anggaran 2024 (Audited)
Beban Pegawai	9.185.247.054,00	9.401.713.862,00
Beban Persediaan	681.591.342,00	455.289.469,00
Beban Jasa	2.130.103.049,00	1.972.966.631,00
Beban Pemeliharaan	301.528.889,00	239.174.190,00
Beban Perjalanan Dinas	809.850.141,00	2.693.823.838,00
Beban Bunga	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	657.298.334,00	518.468.809,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Transfer	0,00	0,00
Beban Lain-lain	13.561.560,00	2.255.000,00
Jumlah	13.779.180.369,00	15.283.691.799,00

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta jenjang struktural dibawahnya merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Untuk Tahun Anggaran 2025, entitas akuntansi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencakup:

No	Bidang/Bagian/Satker	Jumlah Subbid/Subbag/Subsatker
1	Kepala Dinas	-
2	Sekretariat	1 Subbag
3	Bidang Fasilitas Kependudukan (FPAK)	-
4	Bidang Pengelolaan Kependudukan (PIAK)	-
Jumlah Subbid/Subbag/Subsatker		1 Subbag

Sedangkan penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang meliputi pencatatan barang milik daerah (aset tetap dan persediaan) dalam rangka menghasilkan akun laporan neraca dilakukan oleh Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu, yang mencakup:

No	Pengelola BMD	Jumlah
1	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1 Orang
2	Pengurus Barang	1 Orang
3	Pengurus Barang Pembantu	2 Orang
Total		4 Orang

4.2 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berdasarkan proses akuntansi yang menghasilkan data/laporan keuangan dari seluruh satuan kerja beserta jenjang struktural dibawahnya yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Laporan Keuangan yang disajikan dihasilkan melalui proses akuntansi keuangan dan proses pencatatan barang milik daerah.

Proses akuntansi dan pencatatan tersebut dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran seluruh unit kerja yang berada dibawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil . Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan-LRA dan Belanja

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo akun-akun neraca dari seluruh unit kerja yang berada dibawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo akun-akun Laporan Operasional dari seluruh unit kerja yang berada di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil . Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Surplus dan Defisit-LO.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas seluruh unit kerja yang berada di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta dalam rangka pengungkapan yang memadai.

4.3 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun menggunakan basis akrual untuk pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas pada Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian yang berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan dari Kas Umum Daerah.

Sedangkan untuk pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas pada Laporan Realisasi Anggaran, yaitu diakui pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Daerah atau di Bendahara Penerimaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau saat kas dibayar dari Kas Umum Daerah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

4.4 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau SK PERANGKAT DAERAH atau entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas dicatat berdasarkan azas bruto tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pendapatan-LRA dinilai sebesar nilai tercatat. Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas Pendapatan-LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Belanja dinilai sebesar nilai tercatat. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas Belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

(3) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai yang tertera pada dokumen pendukung pendapatan berdasarkan azas bruto. Pendapatan-LO dinilai sebesar nilai tercatat. Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi sumber pendapatan.

Dengan basis akrual, Pendapatan-LO diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan;
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi berupa penerimaan kas di Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Umum Daerah maupun sumber daya ekonomi non kas yang diterima oleh entitas.

(4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan. Beban disajikan pada Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonomi.

(5) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya

nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak memenuhi kriteria tersebut, dikategorikan sebagai aset non lancar.

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika (1) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan, atau (2) berupa kas dan setara kas.

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, dan beban dibayar di muka.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar nilai perolehan, yaitu jumlah uang yang ditempatkan atau dikeluarkan untuk memperoleh investasi tersebut. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga (saham dan obligasi jangka pendek) diperoleh tanpa biaya perolehan maka investasi itu dinilai berdasarkan nilai wajar yaitu harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham (deposito jangka pendek) diukur sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Pengukuran **Piutang** dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi yang menjadi hak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Piutang dinilai sebesar jumlah yang dapat direalisasikan, setelah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih, dan penghapusan piutang. Piutang pada tanggal Neraca disajikan secara wajar sesuai dengan nilai piutang yang dapat ditagih (net realizable value). Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak.

Untuk menghasilkan nilai piutang secara wajar maka dilakukan **Penyisihan Piutang Tak Tertagih**. Pada akhir periode anggaran dilakukan analisis atas kemungkinan nilai piutang yang dapat ditagih maupun yang tidak dapat ditagih. Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang didasarkan pada umur piutang, dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan, karena jenis piutang sangat bervariasi dan kemungkinan tidak tertagih juga sangat bervariasi, tergantung pada karakteristik piutang yang bersangkutan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih menggunakan pendekatan neraca (balance sheet), yaitu dengan cara perhitungan daftar umur piutang (aging schedule). Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah

Pengukuran Persediaan adalah sebagai berikut:

- a. Harga perolehan jika Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction);
- d. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan metoda Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau *First In First Out* (FIFO).

Persediaan biologis adalah persediaan yang mengalami pertumbuhan, seperti hewan dan tumbuhan. Pada saat perolehan pertama kali, aset biologis diukur dengan:

- a. Harga perolehan, atau
- b. Nilai wajar jika harga perolehan tidak tersedia.

Pada saat terjadi transformasi biologis, maka aset biologis akan diukur sebesar nilai wajar. Contohnya sapi yang melahirkan anak maka anak sapi tersebut diukur sebesar nilai wajar.

Persediaan biologis diukur setiap akhir periode akuntansi berdasarkan nilai wajar. Selisih nilai wajar akibat transformasi biologis akan diakui sebagai:

- a. Pendapatan non operasional, jika terjadi penambahan nilai wajar; dan
- b. Beban non operasional, jika terjadi pengurangan nilai wajar.

Nilai Wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Beban Dibayar Dimuka merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang merupakan klaim pihak tertentu yang pelunasannya dalam bentuk selain kas. Beban Dibayar Dimuka timbul akibat pembelian (belanja) barang/Jasa atau aktiva lain yang belum diterima atau belum sepenuhnya diterima oleh Pemda.

2. Aset Non Lancar

Aset Non Lancar meliputi semua aset selain yang termasuk pada dua kriteria aset lancar. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tidak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset Non Lancar meliputi Investasi jangka panjang, Aset tetap, Dana Cadangan dan Aset lainnya.

1. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi non permanen dan investasi permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi Non Permanen meliputi:

- (1) pinjaman kepada perusahaan negara;
- (2) pinjaman kepada perusahaan daerah;
- (3) pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya;
- (4) investasi dalam surat utang negara;
- (5) investasi dalam proyek pembangunan;
- (6) investasi nonpermanen lainnya.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen terdiri dari penyertaan modal di perusahaan daerah dan di perusahaan negara.

Investasi Permanen dinilai menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penilaian investasi permanen dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan Metode biaya; Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

2. Aset Tetap

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan;

- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset Tetap dilaporkan pada neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2025 berdasarkan harga perolehan dan/atau berdasarkan penilaian kembali oleh Tim Penertiban Aset BMD.

Aset Tetap dinilai sebesar biaya perolehan. Apabila biaya perolehan aset tetap tidak tersedia, maka nilai aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Belanja Modal yang nilainya dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap, tidak disajikan sebagai aset tetap di Neraca, namun dicatat tersendiri sebagai *Extracomptable*.

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Suatu pengeluaran dikapitalisasi menjadi aset tetap, jika memenuhi kriteria :

- a. Dibayarkan melalui mekanisme belanja modal;
- b. Jumlah pengeluaran minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) unit barang;
- c. Jumlah pengeluaran minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk per grup;
- d. Aset yang diperoleh memenuhi kriteria aset tetap.

Aset tetap, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, disusutkan untuk menunjukkan penurunan nilai dan manfaatnya. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

3. Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Pembentukan Dana Cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak berwujud, dan Aset Lain-lain.

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa.

(i) Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

(ii) Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

(iii) Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa

menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari sewa aset pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca. Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan

Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Aset Lainnya.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat berupa Pihak Ketiga-Sewa yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji, Bangun Guna Serah (BGS)/ *Build Operate Transfer* (BOT) yang dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut, atau Bangun Serah Guna (BGS)/ *Build Transfer Operate* (BTO) yang dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset kerjasama/kemitraan selain tanah dilakukan penyusutan dengan metode garis lurus. Masa manfaat dan nilai residu dipersamakan dengan masa manfaat dan nilai residu jenis aset yang sama di Aset Tetap

Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan, termasuk hak atas kekayaan intelektual, yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki oleh Pemerintah Provinsi untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Aset Tidak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tidak Berwujud, suatu aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Aset nonkeuangan;
- b. Tidak berwujud;
- c. Biaya perolehan dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

- f. Dapat diidentifikasi;
- g. Dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- h. Mempunyai potensi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan lebih dari dua belas bulan

Terhadap aset tidak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi kedalam **Aset Lain-lain**. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Di samping itu, piutang macet Perangkat Daerah yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional; perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah; kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya dan Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya; kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Utang Belanja.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai **Kewajiban Jangka Panjang** jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikan atau penurunan hak pemerintah atas kekayaan pemerintah, yang diakibatkan oleh adanya surplus/(defisit)-LO, SiLPA/SiKPA, serta penutupan saldo Perubahan SAL. Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

4.5 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP ENTITAS AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas pos-pos Laporan Keuangan seluruhnya sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp13.478.789.125,00 atau 96,04 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp14.034.884.163,00 . Realisasi Belanja ini berasal dari Belanja Operasi sebesar Rp13.136.877.642,00 Belanja Modal sebesar Rp341.911.483,00 .

Belanja Operasi sebesar Rp13.136.877.642,00 atau 96,15 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp13.662.218.051,00 , terdiri dari:

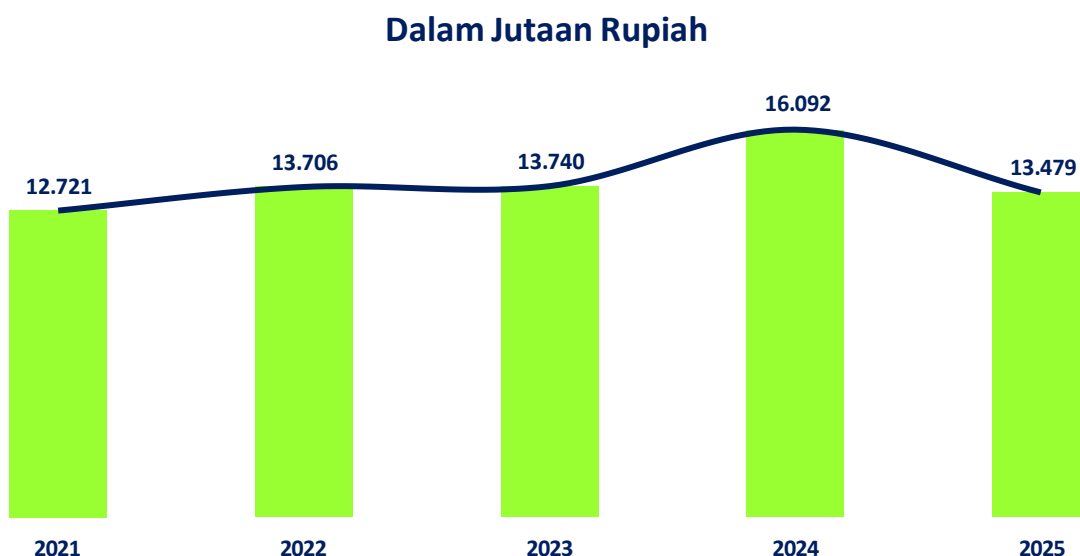
- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp9.185.247.054,00 atau 96,35 dari yang dianggarkan sebesar Rp9.533.657.478,00 ;
- 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3.951.630.588,00 atau 95,71 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp4.128.560.573,00 ;

Belanja Modal sebesar Rp341.911.483,00 atau 91,75 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp372.666.112,00 , terdiri dari:

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp341.911.483,00 atau 91,75 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp372.666.112,00 ;

Trend realisasi Belanja selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik Trend Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2020 s.d 2025



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan realisasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,00 dan realisasi Belanja sebesar Rp13.478.789.125,00 maka terjadi Surplus/(Defisit)-LRA sebesar - Rp13.478.789.125,00.

5.1.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.2.1 Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp13.478.789.125,00 atau 96,04 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp14.034.884.163,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 96,04 persen pagu disebabkan beberapa hal diantaranya yang paling signifikan yaitu:

1. Terdapat sisa anggaran dari Belanja Pegawai dikarenakan ada Jabatan yang belum terisi sampai saat ini.
2. Terdapat sisa anggaran dari sisa hasil belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan hasil Negosiasi serta sisa belanja perjalanan dinas.
3. Terdapat sisa anggaran dari belanja modal disebabkan adanya sisa hasil

Negosiasi.

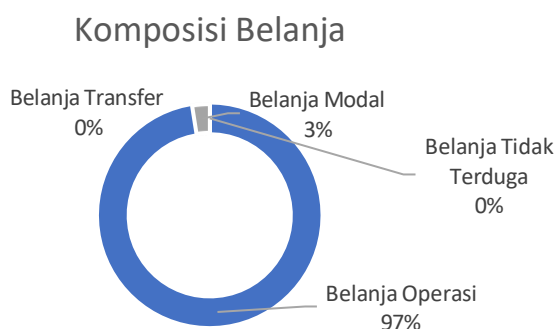
Realisasi Belanja sebesar Rp13.478.789.125,00 berasal dari Belanja Operasi sebesar Rp13.136.877.642,00 , Belanja Modal sebesar Rp341.911.483,00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.091.638.279,00 , berarti realisasi Belanja menurun sebesar - Rp2.612.849.154,00 atau -16,24 persen dibanding Tahun Anggaran 2024.

Realisasi penyerapan Belanja pada Tahun Anggaran 2025 menurun dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Menurunnya realisasi anggaran pada belanja gaji disebabkan adanya mutasi perpindahan pegawai.
2. Menurunnya realisasi anggaran pada belanja barang dan jasa disebabkan adanya refocusing anggaran dan penyesuaian kebutuhan.
3. Menurunnya realisasi anggaran pada belanja modal disebabkan adanya refocusing anggaran dan penyesuaian kebutuhan.

Berikut ini disajikan grafik komposisi realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025.

Grafik Komposisi Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2025



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi terbesar dari Belanja berasal dari Belanja Operasi yaitu sebesar 13.136.877.642,00 atau 97 persen dari Total Belanja.

5.1.2.1.1 Belanja Operasi

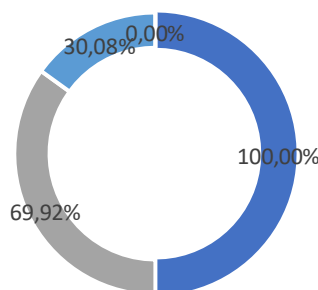
Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp13.136.877.642,00 atau 96,15 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp13.662.218.051,00 . Realisasi Belanja Operasi ini berasal dari Belanja Pegawai sebesar Rp9.185.247.054,00 ,Belanja Barang dan jasa sebesar Rp3.951.630.588,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp14.767.326.279,00, berarti realisasi Belanja Operasi mengalami perubahan sebesar Rp1.630.448.637,00 atau 11,04 persen dibanding Tahun Anggaran 2024.

Berikut ini disajikan grafik komposisi realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025.

Grafik Komposisi Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2025

Komposisi Belanja Operasi



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi terbesar dari Belanja Operasi berasal dari Belanja Pegawai yaitu sebesar 69,92 persen dari Total Belanja Operasi.

5.1.2.1.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.185.247.054,00 atau 96,35 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp9.533.657.478,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Terdapat sisa anggaran dari Belanja Pegawai dikarenakan ada Jabatan yang belum terisi sampai saat ini.

Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2025	Realisasi Tahun Anggaran 2025 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.629.776.486,00	2.531.905.718,00	96,28
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.868.491.317,83	1.810.165.753,00	96,88
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	171.833.758,50	163.924.767,00	95,40
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	106.926.250,00	105.980.000,00	99,12
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	71.788.860,00	69.135.000,00	96,30
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	60.106.875,00	58.100.000,00	96,66
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	107.212.018,00	102.812.260,00	95,90
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.798.059,00	7.708.356,00	87,61
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	26.945,00	23.733,00	88,08
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	206.501.963,00	199.090.000,00	96,41
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.888.362,00	3.741.465,00	96,22
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	11.578.310,67	11.224.384,00	96,94
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	12.623.767,00	0,00	0,00
5.1.01.01.13	Belanja Jaminan Hari Tua ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.903.880.992,00	6.653.341.336,00	96,37
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.867.390.382,00	6.636.981.492,00	96,64
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	20.000.000,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	16.490.610,00	16.359.844,00	99,21
Jumlah		9.533.657.478,00	9.185.247.054,00	96,35

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.401.713.862,00 , berarti realisasi Belanja Pegawai menurun sebesar - Rp216.466.808,00 atau -2,30 persen dibanding Tahun Anggaran 2024.

Realisasi belanja pegawai pada tahun 2025 menurun sebesar -2,30 persen disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Menurunnya realisasi anggaran pada belanja gaji disebabkan adanya mutasi perpindahan pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2025 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	YoY %
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.531.905.718,00	2.541.896.224,00	-0,39
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.810.165.753,00	1.823.426.300,00	-0,73
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	163.924.767,00	166.734.912,00	-1,69
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	105.980.000,00	105.980.000,00	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	69.135.000,00	62.540.000,00	10,55
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	58.100.000,00	60.735.000,00	-4,34
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	102.812.260,00	102.546.720,00	0,26
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.708.356,00	5.150.324,00	49,67
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23.733,00	24.578,00	-3,44
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	199.090.000,00	200.157.440,00	-0,53
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.741.465,00	3.650.238,00	2,50
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.224.384,00	10.950.712,00	2,50
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.653.341.336,00	6.535.910.689,00	1,80
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.636.981.492,00	6.432.656.689,00	3,18
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0,00	103.254.000,00	-100,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	16.359.844,00	0,00	100,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	323.906.949,00	-100,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	-100,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	-100,00
Jumlah		9.185.247.054,00	9.401.713.862,00	-2,30

5.1.1.1.1.1 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.951.630.588,00 atau 95,71 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp4.128.560.573,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Terdapat sisa anggaran dari Belanja Barang & Jasa hasil Negosiasi dan sisa belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2025	Realisasi Tahun Anggaran 2025 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.1.02.01	Belanja Barang	820.632.328,00	708.437.582,00	86,33
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	814.632.328,00	702.776.582,00	86,27
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	6.000.000,00	5.661.000,00	94,35
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.179.084.785,00	2.131.813.976,00	97,83
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.077.139.446,00	2.040.439.881,00	98,23
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	45.435.339,00	45.435.288,00	100,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	28.010.000,00	22.292.307,00	79,59
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	28.500.000,00	23.646.500,00	82,97
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	312.900.000,00	301.528.889,00	96,37
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	299.568.000,00	288.628.889,00	96,35
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.332.000,00	12.900.000,00	96,76
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	815.943.460,00	809.850.141,00	99,25
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	815.943.460,00	809.850.141,00	99,25
Jumlah		4.128.560.573,00	3.951.630.588,00	95,71

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.365.612.417,00 , berarti realisasi Belanja Barang dan jasa menurun sebesar -Rp1.413.981.829,00 atau -26,35 persen dibanding Tahun Anggaran 2024.

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2025 menurun disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Terdapat sisa anggaran dari Belanja Barang dan Jasa hasil Negosiasi dan sisa belanja pemeliharaan serta belanja perjalanan dinas.

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024, dapat

dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2025 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	YoY %
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.1.02.01	Belanja Barang	708.437.582,00	459.293.719,00	54,24
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	702.776.582,00	459.293.719,00	53,01
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	5.661.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.131.813.976,00	1.973.320.670,00	8,03
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.040.439.881,00	1.890.700.854,00	7,92
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	45.435.288,00	47.209.816,00	-3,76
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	22.292.307,00	21.830.000,00	2,12
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	23.646.500,00	13.580.000,00	74,13
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	301.528.889,00	239.174.190,00	26,07
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	288.628.889,00	239.174.190,00	20,68
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.900.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	809.850.141,00	2.693.823.838,00	-69,94
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	809.850.141,00	2.693.823.838,00	-69,94
Jumlah		3.951.630.588,00	5.365.612.417,00	-26,35

5.1.1.1.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp341.911.483,00 atau 91,75 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp372.666.112,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Terdapat sisa anggaran dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta hasil Negosiasi.

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp341.911.483,00 .

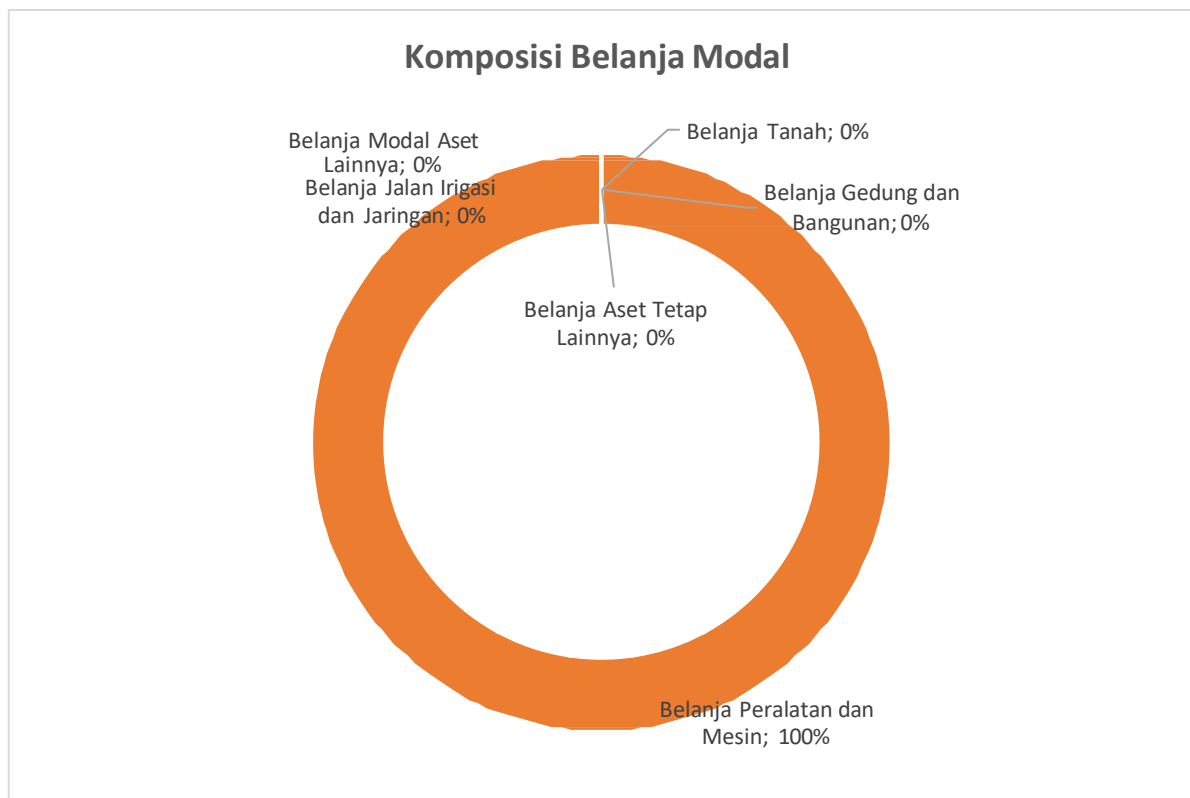
Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.324.312.000,00 , berarti realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 menurun sebesar -Rp982.400.517,00 atau -74,18 persen.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 menurun disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Menurunnya realisasi anggaran pada belanja modal disebabkan adanya refocusing anggaran dan penyesuaian kebutuhan.

Berikut ini disajikan grafik komposisi realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025.

Grafik Komposisi Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2025



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi terbesar dari Belanja Modal berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu sebesar 100 persen dari Total Belanja Modal.

5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp341.911.483,00 atau 91,75 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp372.666.112,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Terdapat sisa anggaran dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta hasil

Negosiasi

Rincian realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2025	Realisasi Tahun Anggaran 2025 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	112.671.912,00	100.921.805,00	89,57
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	21.053.112,00	19.872.330,00	94,39
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	89.618.800,00	79.495.475,00	88,70
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.000.000,00	1.554.000,00	77,70
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.500.000,00	3.799.998,00	84,44
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	4.500.000,00	3.799.998,00	84,44
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.550.000,00	2.829.000,00	79,69
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.550.000,00	2.829.000,00	79,69
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	251.944.200,00	234.360.680,00	93,02
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	222.600.000,00	209.000.000,00	93,89
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	29.344.200,00	25.360.680,00	86,42
Jumlah		372.666.112,00	341.911.483,00	91,75

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.324.312.000,00 , berarti realisasi Belanja Peralatan dan Mesin menurun sebesar -Rp982.400.517,00 atau -74,18 persen dibanding Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan oleh :

1. Menurunnya realisasi anggaran pada belanja modal disebabkan adanya refocusing anggaran dan penyesuaian kebutuhan.

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2025 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	YoY %
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	6.592.000,00	-100,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	6.592.000,00	-100,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	8.600.000,00	-100,00

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2025 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	YoY %
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	8.600.000,00	-100,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	2.070.000,00	-100,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	2.070.000,00	-100,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	100.921.805,00	334.001.000,00	-69,78
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	19.872.330,00	131.100.000,00	-84,84
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	79.495.475,00	184.341.000,00	-56,88
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.554.000,00	18.560.000,00	-91,63
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.799.998,00	227.149.000,00	-98,33
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	3.799.998,00	70.100.000,00	-94,58
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	157.049.000,00	-100,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.829.000,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.829.000,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	234.360.680,00	745.900.000,00	-68,58
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	209.000.000,00	433.600.000,00	-51,80
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	25.360.680,00	312.300.000,00	-91,88
Jumlah		341.911.483,00	1.324.312.000,00	-74,18

5.1.2.2.2.3 Surplus/(Defisi) – LRA

Berdasarkan realisasi Pendapatan – LRA dan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surplus/(Defisit) - LRA Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar -Rp13.478.789.125,00, dengan perhitungan sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2025 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)
Belanja - LRA	13.478.789.125,00	16.091.638.279,00
Surplus/ (Defisit) – LRA	-13.478.789.125,00	-16.091.638.279,00

5.1.2.5 Perhitungan Anggaran

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar -Rp13.478.789.125,00. Perhitungan Anggaran diperoleh dari selisih antara anggaran dengan realisasinya. Jumlah keseluruhan selisih merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Rincian realisasi Perhitungan Anggaran adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2025 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)
Penghematan Belanja	-556.095.038,00	-692.736.760,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	-13.478.789.125,00	-16.091.638.279,00

5.1.2.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar -Rp13.478.789.125,00. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diperoleh dari selisih realisasi Pendapatan – LRA, Belanja, dan Pembiayaan Netto tahun berkenaan. Jumlah keseluruhan selisih realisasi merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Berdasarkan Surplus / Defisit–LRA sebesar -Rp13.478.789.125,00, Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp0,00 , maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar -Rp13.478.789.125,00 , dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2025 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)
Pendapatan – LRA	0,00	0,00
Belanja - LRA	13.478.789.125,00	16.091.638.279,00
Surplus / (Defisit) – LRA	-13.478.789.125,00	-16.091.638.279,00
Pembiayaan Netto	0,00	0,00
SILPA	-13.478.789.125,00	-16.091.638.279,00

Dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar -Rp13.478.789.125,00 .

CATATAN PENTING LAINNYA

-

5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

5.2.1 PENJELASAN UMUM NERACA

Ringkasan Komposisi Neraca per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Aset Lancar	13.942.945,00	16.853.850,00
Aset Tetap	7.033.093.501,00	7.332.284.767,00
Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Aset	7.047.036.446,00	7.349.138.617,00
Kewajiban Jangka Pendek	6.012.815,00	7.723.742,00
Jumlah Kewajiban	6.012.815,00	7.723.742,00
Ekuitas	7.041.023.631,00	7.341.414.875,00
Jumlah Ekuitas	7.041.023.631,00	7.341.414.875,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	7.047.036.446,00	7.349.138.617,00

Jumlah Aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.047.036.446,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp13.942.945,00 , Aset Tetap sebesar Rp7.033.093.501,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp0,00 .

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.012.815,00 seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.041.023.631,00 .

5.2.2 PENJELASAN PER POS NERACA

5.2.2.1 Aset Lancar

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.942.945,00 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.853.850,00 . Hal ini berarti asset lancar turun sebesar -Rp2.910.905,00 atau -17,27 persen.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Jenis Aset Lancar	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Persediaan	13.942.945,00	16.853.850,00
Jumlah Aset Lancar	13.942.945,00	16.853.850,00

5.2.2.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

5.2.2.1.2 Persediaan

Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.942.945,00 , sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.853.850,00 . Hal ini berarti persediaan turun sebesar -Rp2.910.905,00 atau -17,27 persen.

Rincian Persediaan terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Barang/perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah	13.942.945,00	16.853.850,00
Jumlah	13.942.945,00	16.853.850,00

Rincian Persediaan berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

JENIS PERSEDIAAN	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Barang Pakai Habis	13.942.945,00	16.853.850,00
Bahan Bangunan Dan Konstruksi	595.000,00	
Alat Tulis Kantor	1.713.205,00	
Bahan Cetak	224.997,00	
Alat Listrik	0,00	7.808.850,00
Suvenir/Cendera Mata	0,00	7.650.000,00
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	11.409.743,00	1.395.000,00
Natura	11.409.743,00	1.395.000,00
JUMLAH PERSEDIAAN	13.942.945,00	16.853.850,00

5.2.2.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.033.093.501,00 , sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.332.284.767,00 . Hal ini berarti Aset Tetap turun sebesar -Rp299.191.266,00 atau -4,08 persen. Rincian Aset Tetap terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Tanah	5.138.640.000,00	5.138.640.000,00
Peralatan dan Mesin	9.685.930.902,00	9.327.823.834,00
Gedung dan Bangunan	5.354.291.538,00	5.354.291.538,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	67.202.000,00	67.202.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	-13.212.970.939,00	-12.555.672.605,00
Jumlah	7.033.093.501,00	7.332.284.767,00

5.2.2.2.1 Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.138.640.000,00 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.138.640.000,00 . Hal ini berarti jumlah asset tetap Tanah tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen.

5.2.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.685.930.902,00 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.327.823.834,00 . Hal ini berarti jumlah asset tetap Peralatan dan Mesin naik sebesar Rp358.107.068,00 atau 3,84 persen.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Jenis	Saldo Akhir 2024	Saldo Awal 2025	Mutasi		Saldo Akhir 2025
				Tambah	Kurang	
1	Alat Besar	117.581.000	117.581.000			
1.1	Alat Besar Darat					
1.2	Alat Bantu	117.581.000	117.581.000			
2	Alat Angkutan	2.341.362.285	2.341.362.285			
2.1	Alat Angkutan Darat Bermotor	2.341.362.285	2.341.362.285			
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.600.000	8.600.000			
3.1	Alat Bengkel Bermesin	8.600.000	8.600.000			
3.3	Alat Ukur					
4	Alat Pertanian	2.070.000	2.070.000			
4.1	Alat Pengolahan	2.070.000	2.070.000			
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.245.932.021	3.245.932.021	118.626.305		106.864745
5.1	Alat Kantor.	1.326.076.630	1.326.076.630	25.533.330	11.761.560	13.771.770
5.2	Alat Rumah Tangga	1.521.570.481	1.521.570.481	91.538.975		91.538.975
5.3	Meubelair	398.284.910	398.284.910	1.554.000		1.554.000

No	Jenis	Saldo Akhir 2024	Saldo Awal 2025	Mutasi		Saldo Akhir 2025
				Tambah	Kurang	
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	582.866.532	582.866.532	15.852.643		15.852.643
6.1	Alat Studio.	200.625.260	200.625.260	15.852.643		15.852.643
6.2	Alat Komunikasi	263.441.272	263.441.272			
6.3	Peralatan Pemancar	118.800.000	118.800.000			
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan			2.829.000		2.829.000
7.1	Alat Kedokteran.			2.829.000		2.829.000
7.2	Alat Kesehatan Umum					
9	Komputer	3.007.411.996	3.007.411.996	234.360.680		232.560.680
9.2	Komputer Unit	1.621.729.588	1.621.729.588	209.000.000		209.000.000
9.2	Peralatan Komputer	1.385.682.408	1.385.682.408	25.360.680	1.800.000	23.560.680
11	Peralatan Olah Raga	22.000.000	22.000.000			
11.1	Peralatan Olah Raga.	22.000.000	22.000.000			
Jumlah		9.327.823.834	9.327.823.834	371.668.628	13.561.560	358.107.068

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin tersebut adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Saldo Awal	9.327.823.834,00
Penambahan:	
Realisasi Belanja Modal Yang Menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin (*)	341.911.483,00
Penerimaan dari OPD lain (Mutasi masuk antar OPD)	
Pengembangan (Kapitalisasi)	
Koreksi Pencatatan	
Reklasifikasi dari Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Masuk)	5.661.000,00
Reklasifikasi dari Jenis Persediaan (Reklasifikasi Masuk)	24.096.145,00
Hibah/Pengakuan Penerimaan Lainnya Yang Sah	
Aset Tetap dari BTT	
Jumlah Penambahan	
Pengurangan:	
Penghapusan	
Penyerahan Aset Tetap ke OPD Lain (Mutasi Keluar Antar OPD)	
Koreksi Pencatatan	
Reklasifikasi ke Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Keluar)	13.561.560
Reklasifikasi ke Persediaan (Reklasifikasi Keluar)	
Hibah/Pengakuan Pengeluaran Lainnya Yang Sah	
Hibah/Mutasi Keluar Aset Tetap dari BTT	
Jumlah Pengurangan	
Jumlah Per 31 Des 2025	9.685.930.902,00

(*) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp341.911.483,00 berasal dari:

- 1) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada LRA Tahun 2025 Anggaran adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Koding	Uraian	31 Desember 2025
5.2.02	BM Peralatan dan Mesin	341.911.483,00
Jumlah Belanja		341.911.483,00

- 2) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.561.560,00 .

Penambahan Peralatan dan Mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan adanya realisasi belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp13.561.560,00 dan terdapatnya penambahan Peralatan dan Mesin yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal.

5.2.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.354.291.538,00 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar 5.354.291.538,00 .Hal ini berarti Gedung dan Bangunan tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Jenis	Saldo Akhir 2024	Saldo Awal 2025	Mutasi		Saldo Akhir 2025
				Tambah	Kurang	
1	Gedung Kantor	5.354.291.538,00	5.354.291.538,00	0,00	0,00	5.354.291.538,00
Jumlah		5.354.291.538,00	5.354.291.538,00	0,00	0,00	5.354.291.538,00

5.2.2.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp67.202.000,00 , sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp67.202.000,00 .

Hal ini berarti nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dibandingkan tahun 2024.

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Jenis	Saldo Akhir 2024	Saldo Awal 2025	Mutasi		Saldo Akhir 2025
				Tambah	Kurang	
1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	67.202.000,00	67.202.000,00	0,00	0,00	67.202.000,00
Jumlah		67.202.000,00	67.202.000,00	0,00	0,00	67.202.000,00

5.2.2.2.5 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan merupakan jumlah total akumulasi penyusutan dari Aset Tetap, yang terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan Aset Tetap Lainnya. Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025 sebesar -Rp13.212.970.939,00 sedangkan Per 31 Desember 2024 sebesar -Rp12.555.672.605,00. Hal ini Akumulasi Penyusutan berarti turun sebesar -Rp657.298.334,00 atau 5,24 persen.

Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025 sebesar -Rp13.212.970.939,00 dari Total Aset Tetap Tahun 2025 sebesar Rp7.033.093.501,00 .

Berikut rincian Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025 (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	8.072.271.035,00	7.457.375.661,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.099.261.600,00	5.060.218.772,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.438.304,00	38.078.172,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	13.212.970.939,00	12.555.672.605,00

5.2.2.3 Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.012.815,00 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.723.742,00 . Hal ini berarti turun sebesar -Rp1.710.927,00 atau -22,15 persen.

Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.012.815,00 seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

5.2.2.4.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.012.815,00 ,sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.723.742,00 . Hal ini berarti kewajiban jangka pendek turun sebesar -Rp1.710.927,00 atau -22,15 persen.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Utang Belanja	6.012.815,00	7.723.742,00
Jumlah	6.012.815,00	7.723.742,00

5.2.2.4.2 Utang Belanja

Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.012.815,00 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.723.742,00 . Hal ini berarti utang belanja tidak mengalami perubahan sebesar -Rp1.710.927,00 atau -22,15 persen.

Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.012.815,00 tersebut merupakan belanja listrik dan telepon.

5.2.2.5 Ekuitas

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.041.023.631,00 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.341.414.875,00 . Hal ini berarti ekuitas turun sebesar -Rp300.391.244,00 atau -4,09 persen.

5.2.3 CATATAN PENTING LAINNYA

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Ringkasan Laporan Operasional tahun 2025 adalah sebagai berikut (disajikan dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
Pendapatan-LO	0,00	0,00
Beban	13.779.180.369,00	15.283.691.799,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	-13.779.180.369,00	-15.283.691.799,00
Surplus/(Defisit)-LO	-13.779.180.369,00	-15.283.691.799,00

Jumlah Beban tahun 2025 sebesar Rp13.779.180.369,00 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp9.185.247.054,00 , Beban Persediaan sebesar Rp681.591.342,00 , Beban Jasa sebesar Rp2.130.103.049,00 , Beban Pemeliharaan sebesar Rp301.528.889,00 , Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp809.850.141,00 , Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp657.298.334,00 , dan Beban Lain-lain sebesar Rp13.561.560,00 . Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 sebesar -Rp13.779.180.369,00 terdiri dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 , dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 . Pos Luar Biasa tahun 2025 sebesar Rp0,00 . Surplus/(Defisit)-LO tahun 2025 sebesar -Rp13.779.180.369,00 diperoleh dari Pendapatan-LO sebesar Rp0,00 dikurangi dengan Beban sebesar Rp13.779.180.369,00 ditambah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 dan Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 .

5.3.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.2.1 Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Realisasi Beban tahun 2025 adalah sebesar Rp13.779.180.369,00 terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
Beban Pegawai	9.185.247.054,00	9.401.713.862,00
Beban Persediaan	681.591.342,00	455.289.469,00
Beban Jasa	2.130.103.049,00	1.972.966.631,00
Beban Pemeliharaan	301.528.889,00	239.174.190,00
Beban Perjalanan Dinas	809.850.141,00	2.693.823.838,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	657.298.334,00	518.468.809,00
Beban Lain-lain	13.561.560,00	2.255.000,00
Jumlah	13.779.180.369,00	15.283.691.799,00

Berikut ini disajikan komposisi realisasi masing-masing jenis Beban terhadap realisasi total Beban:

5.3.2.1.1 Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai tahun 2025 sebesar Rp9.185.247.054,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi Beban pegawai tahun 2024 sebesar Rp9.401.713.862,00 , maka realisasi beban pegawai menurun sebesar - Rp216.466.808,00 atau -2,30persen.

Rincian Objek Beban Pegawai adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.531.905.718,00	2.541.896.224,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	6.653.341.336,00	6.535.910.689,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	323.906.949,00
Jumlah	9.185.247.054,00	9.401.713.862,00

5.3.2.1.2 Beban Persediaan

Realisasi Beban Persediaan tahun 2025 adalah sebesar Rp681.591.342,00 , Apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Persediaan tahun 2024 sebesar Rp455.289.469,00 , berarti realisasi Beban Persediaan sebesar meningkat sebesar Rp226.301.873,00 atau 49,71persen dibanding tahun 2024.

Rincian Objek Beban Persediaan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
Beban Barang Pakai Habis	681.591.342,00	455.289.469,00
Jumlah	681.591.342,00	455.289.469,00

5.3.2.1.3 Beban Jasa

Realisasi Beban Jasa tahun 2025 adalah sebesar Rp2.130.103.049,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Jasa tahun 2024 sebesar Rp1.972.966.631,00 , berarti realisasi Beban Jasa meningkat sebesar Rp157.136.418,00 atau 7,96 persen dibanding tahun 2024.

Rincian Objek Beban Jasa adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
Beban Jasa Kantor	2.038.728.954,00	1.890.346.815,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	45.435.288,00	47.209.816,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	22.292.307,00	21.830.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	23.646.500,00	13.580.000,00
Jumlah	2.130.103.049,00	1.972.966.631,00

5.3.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2025 adalah sebesar Rp301.528.889,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2024 sebesar Rp239.174.190,00 , berarti realisasi Beban Pemeliharaan meningkat sebesar Rp62.354.699,00 atau 26,07 persen dibanding tahun 2024.

Rincian Objek Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	288.628.889,00	239.174.190,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.900.000,00	0,00
Jumlah	301.528.889,00	239.174.190,00

5.3.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Realisasi Beban Perjalanan Dinas tahun 2025 adalah sebesar Rp809.850.141,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Perjalanan Dinas tahun 2024 sebesar Rp2.693.823.838,00 , berarti realisasi Beban Perjalanan Dinas menurun sebesar - Rp1.883.973.697,00 atau -69,94 persen dibanding tahun 2024.

Rincian realisasi Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	809.850.141,00	2.693.823.838,00
Jumlah	809.850.141,00	2.693.823.838,00

5.3.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2025 adalah sebesar Rp657.298.334,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 sebesar Rp518.468.809,00 , berarti realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi meningkat sebesar Rp138.829.525,00 atau 26,78persen dibanding tahun 2024.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
I	Beban Penyusutan		
1.	Peralatan dan Mesin	614.895.374,00	461.055.756,00
2.	Gedung dan Bangunan	39.042.828,00	54.052.921,00
3.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.360.132,00	3.360.132,00
	Jumlah Beban Penyusutan	657.298.334,00	518.468.809,00
II	Beban Amortisasi		
	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
	Jumlah Beban Amortisasi	0,00	0,00
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	657.298.334,00	518.468.809,00

5.3.2.1.7 Beban Lain-lain

Realisasi Beban Lain-lain tahun 2025 adalah sebesar Rp13.561.560,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Lain-lain tahun 2024 sebesar Rp2.255.000,00 , berarti realisasi Beban Lain-lain meningkat sebesar Rp11.306.560,00 atau 501,40 persen.

Rincian Objek Beban Lain-lain adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	13.561.560,00	2.255.000,00
Beban Tidak Terduga	0,00	0,00
Jumlah	13.561.560,00	2.255.000,00

5.3.2.2 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Berdasarkan realisasi Pendapatan-LO dan realisasi Beban tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional tahun 2024 adalah sebesar -Rp13.779.180.369,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
Beban	13.779.180.369,00	15.283.691.799,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	-13.779.180.369,00	-15.283.691.799,00

5.3.2.3 Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa adalah penjumlahan antara Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional, dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional. Dari realisasi Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional tahun 2025 sebesar -Rp13.779.180.369,00 dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 sebesar Rp0,00, maka realisasi Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa tahun 2025 yaitu sebesar Rp0,00.

5.3.2.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan akun untuk menyajikan pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Untuk tahun 2025 tidak terdapat realisasi untuk Pos Luar Biasa.

5.3.2.5 Surplus/(Defisit)-LO

Surplus/(Defisit)-LO adalah penjumlahan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional, Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional, dan Pos Luar Biasa. Realisasi Surplus/(Defisit)-LO tahun 2025 sebesar -Rp13.779.180.369,00, berasal dari (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)
Pendapatan-LO	0,00	0,00
Beban	13.779.180.369,00	15.283.691.799,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	-13.779.180.369,00	-15.283.691.799,00
Surplus/(Defisit)-LO	-13.779.180.369,00	-15.283.691.799,00

5.3.3 CATATAN PENTING LAINNYA

-

5.4.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**5.4.2 PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- a) Ekuitas Awal;
- b) Surplus/Defisit-LO pada Periode bersangkutan;
- c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan
- d) Koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 - (1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - (2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- e) Ekuitas Akhir

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut (disajikan dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2025 (Audited)	Tahun Anggaran 2024 (Audited)
Ekuitas Awal	7.341.414.875,00	6.501.658.395,00
Surplus/(Defisit)-LO	-13.779.180.369,00	-15.283.691.799,00
RK PPKD	13.478.789.125,00	16.091.638.279,00
RA PPKD (Nilai Perolehan)	0,00	31.810.000,00
RA PPKD (Akumulasi Penyusutan)	0,00	0,00
Ekuitas	0,00	0,00
Ekuitas Akhir	7.041.023.631,00	7.341.414.875,00

Ekuitas Akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.041.023.631,00 terdiri dari:

- Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.341.414.875,00 .
- Surplus/Defisit–LO Tahun Anggaran 2025 sebesar -Rp13.779.180.369,00.
- RK PPKD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.478.789.125,00 .

4. RA PPKD (Nilai Perolehan) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 .
5. RA PPKD (Akumulasi Penyusutan) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 .
6. Ekuitas Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 .
7. Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.041.023.631,00 .

5.4.3 PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.3.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.341.414.875,00 . Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir dari Ekuitas Tahun Anggaran 2024 Audited.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.501.658.395,00 , berarti realisasi Ekuitas Awal meningkat sebesar Rp839.756.480,00 atau 12,92 persen dibanding Tahun Anggaran 2024.

5.4.3.2 Surplus/(Defisit)-LO

Surplus/(Defisit)–LO Tahun Anggaran 2025 sebesar -Rp13.779.180.369,00. Akun ini dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/(Defisit)-LO.

Surplus/Defisit–LO Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025 sebesar -Rp13.779.180.369,00. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar -Rp15.283.691.799,00. Hal ini berarti Apabila dibandingkan dengan Surplus/(Defisit)–LO Tahun Anggaran 2025 Surplus/(Defisit)–LO Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meningkat sebesar Rp1.504.511.430,00 atau -9,84 persen dibanding Tahun Anggaran 2024.

5.4.3.3 RK PPKD

RK PPKD adalah nilai yang menunjukkan transaksi kas antar entitas (PPKD dan OPD). RK PPKD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.478.789.125,00 .

5.4.3.4 RA PPKD

RA PPKD adalah nilai yang menunjukkan transaksi aset tetap antar entitas (PPKD dan OPD).

Saldo RA PPKD (Nilai Perolehan) Tahun 2025 terdiri atas penerimaan/mutasi masuk barang dan pengeluaran/mutasi keluar barang sebesar Rp0,00 serta Saldo RA PPKD (Akumulasi Penyusutan) yang berupa nilai akumulasi penyusutan dari nilai aset tersebut sebesar Rp0,00

5.4.3.5 Ekuitas

Akun ekuitas menunjukkan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2025 (Audited)	Tahun Anggaran 2024 (Audited)
Koreksi Saldo Awal Kas		
Koreksi Nilai Persediaan		
Koreksi Nilai Aset Tetap		
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Koreksi Nilai Aset Tak Berwujud		
Koreksi Nilai Aset Lain-Lain		
Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Koreksi Penyusutan Aset Lain-Lain		
Koreksi Kewajiban		
Koreksi Utang Belanja		
Koreksi Beban Barang Dan Jasa		
Koreksi Nilai Ekstrakomtabel		
Lain - Lain		
Jumlah	0,00	0,00

Koreksi ekuitas ini disebabkan oleh :

1.

5.4.3.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.041.023.631,00 . Nilai Ekuitas ini merupakan nilai yang disajikan sebagai akun Ekuitas di Neraca per 31 Desember 2025.

Hal ini Apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.341.414.875,00 , Ekuitas Akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurun sebesar -Rp300.391.244,00 atau -4,09persen dibanding Tahun Anggaran 2025.

5.4.4 CATATAN PENTING LAINNYA

-

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN BPKAD

6.1 DOMISILI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 yang beralamat di Jalan Ciumbuleuit No. 2, Kota Bandung.

6.2 DASAR HUKUM LANDASAN OPERASIONAL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan kegiatan operasionalnya dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

6.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

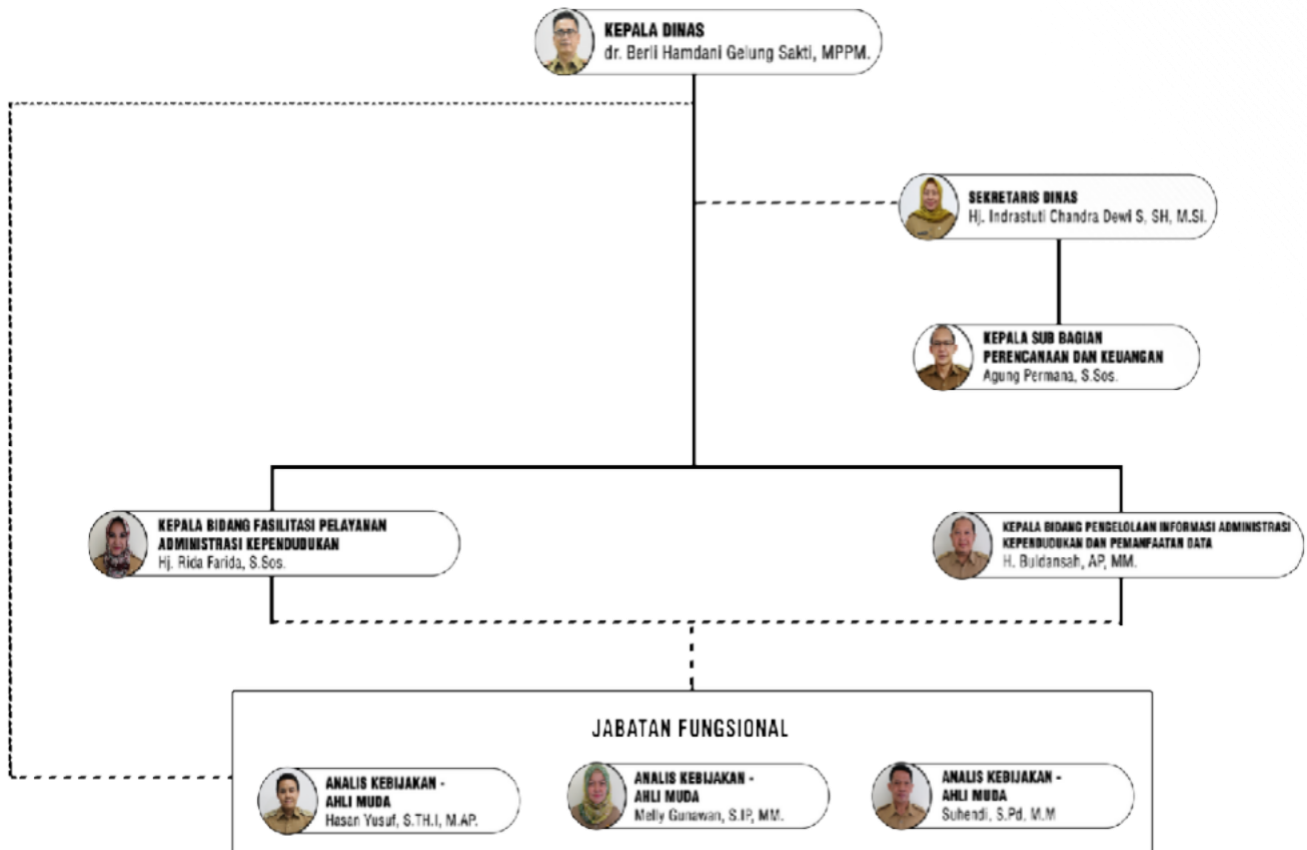
- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
- c. Pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
- d. Pembinaan dan koordinasi Perangkat Daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;

- e. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota;
- f. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- h. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- i. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- j. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- k. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.4 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Jawa Barat



BAB VII**PENUTUP**

Dari uraian diatas dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2025 menunjukkan jumlah Aset sebesar Rp7.047.036.446,00 Kewajiban sebesar Rp6.012.815,00 dan Ekuitas sebesar Rp7.041.023.631,00 ;
2. Realisasi APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025 menunjukkan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp13.478.789.125,00 atau 96,04 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp14.034.884.163,00 .Dengan demikian, terdapat (Defisit)-LRA Belanja sebesar -Rp13.478.789.125,00;
3. Pada Laporan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025 terdapat Beban sebesar Rp13.779.180.369,00 dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 sehingga (Defisit)-LO sebesar -Rp13.779.180.369,00;
4. Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.341.414.875,00 dan Ekuitas Akhir sebesar Rp7.041.023.631,00 .

Bandung, 26 Mei 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



dr. BERLIHAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19661020 199803 1 003

LAMPIRAN



D9CBA58613

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/D9CBA58613>

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S.D. 31 DECEMBER 2025 DAN 31 DECEMBER 2024
(di isi sesuai DPA)

Lampiran 1



jurnal Koreksi											
ma_le	kode rekening	Nama Rekening	Anggaran 2025	Realisasi 31 Desember 2025 (Audited)	Debet	Kredit	Realisasi Setelah Koreksi Tahun 2025	Lebih / (Kurang)	%	Anggaran Perubahan 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2024 (Audited)
Face	5	BELANJA DAERAH	14.034.884.163,00	13.478.789.125,00	0,00	0,00	13.478.789.125,00	-556.095.038,00	96,04	16.784.375.039,00	16.091.638.279,00
Face	5.1	BELANJA OPERASI	13.662.218.051,00	13.136.877.642,00	0,00	0,00	13.136.877.642,00	-525.340.409,00	96,15	15.380.018.954,00	14.767.326.279,00
Face	5.1.01	Belanja Pegawai	9.533.657.478,00	9.185.247.054,00	0,00	0,00	9.185.247.054,00	-348.410.424,00	96,35	9.803.779.152,00	9.401.713.862,00
Face	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.128.560.573,00	3.951.630.588,00	0,00	0,00	3.951.630.588,00	-176.929.985,00	95,71	5.576.239.802,00	5.365.612.417,00
Face	5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Face	5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Face	5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Face	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Face	5.2	BELANJA MODAL	372.666.112,00	341.911.483,00	0,00	0,00	341.911.483,00	-30.754.629,00	91,75	1.404.356.085,00	1.324.312.000,00
Face	5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Face	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	372.666.112,00	341.911.483,00	0,00	0,00	341.911.483,00	-30.754.629,00	91,75	1.404.356.085,00	1.324.312.000,00
Face	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Face	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Face	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Face	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Face		SILPA	-14.034.884.163,00	-13.478.789.125,00	0,00	0,00	-13.478.789.125,00	556.095.038,00		-16.784.375.039,00	-16.091.638.279,00

CONTROL FACE DAN RINCIAN - - - - - - - - - -

ma_le	kode rekening	Nama Rekening	Anggaran 2024	Realisasi 31 Desember 2025 (Audited)	Debet	Kredit	Realisasi Setelah Koreksi Tahun 2025	Lebih / (Kurang)	%	Anggaran Perubahan 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2024 (Audited)
-------	---------------	---------------	---------------	--	-------	--------	---	---------------------	---	--	--

Akun	5	BELANJA DAERAH	14.034.884.163,00	13.478.789.125,00	0,00	0,00	13.478.789.125,00	-556.095.038,00	96,04	16.784.375.039,00	16.091.638.279,00
Kelom	5.1	BELANJA OPERASI	13.662.218.051,00	13.136.877.642,00	0,00	0,00	13.136.877.642,00	-525.340.409,00	96,15	15.380.018.954,00	14.767.326.279,00
Jenis	5.1.01	Belanja Pegawai	9.533.657.478,00	9.185.247.054,00	0,00	0,00	9.185.247.054,00	-348.410.424,00	96,35	9.803.779.152,00	9.401.713.862,00
Objek	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.629.776.486,00	2.531.905.718,00	0,00	0,00	2.531.905.718,00	-97.870.768,00	96,28	2.685.788.391,00	2.541.896.224,00
Rincia	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.868.491.317,83	1.810.165.753,00	0,00	0,00	1.810.165.753,00	-58.325.564,00	96,88	1.925.701.400,00	1.823.426.300,00
Sub R	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.749.455.172,33	1.692.829.220,00			1.692.829.220,00	-56.625.952,00	96,76	1.892.183.400,00	1.791.390.300,00
Sub R	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	119.036.145,50	117.336.533,00			117.336.533,00	-1.699.612,00	98,57	33.518.000,00	32.036.000,00
Rincia	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	171.833.758,50	163.924.767,00	0,00	0,00	163.924.767,00	-7.908.992,00	95,40	172.819.446,00	166.734.912,00
Sub R	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	160.209.730,00	153.000.506,00			153.000.506,00	-7.209.224,00	95,50	168.639.502,00	162.762.448,00
Sub R	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	11.624.028,50	10.924.261,00			10.924.261,00	-699.768,00	93,98	4.179.944,00	3.972.464,00
Rincia	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	106.926.250,00	105.980.000,00	0,00	0,00	105.980.000,00	-946.250,00	99,12	106.840.000,00	105.980.000,00
Sub R	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	106.926.250,00	105.980.000,00			105.980.000,00	-946.250,00	99,12	106.840.000,00	105.980.000,00
Sub R	5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK					0,00	0,00	0,00		
Rincia	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	71.788.860,00	69.135.000,00	0,00	0,00	69.135.000,00	-2.653.860,00	96,30	66.120.000,00	62.540.000,00
Sub R	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	64.206.360,00	61.620.000,00			61.620.000,00	-2.586.360,00	95,97	60.720.000,00	57.140.000,00
Sub R	5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7.582.500,00	7.515.000,00			7.515.000,00	-67.500,00	99,11	5.400.000,00	5.400.000,00
Rincia	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	60.106.875,00	58.100.000,00	0,00	0,00	58.100.000,00	-2.006.875,00	96,66	65.630.000,00	60.735.000,00
Sub R	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	55.696.875,00	53.780.000,00			53.780.000,00	-1.916.875,00	96,56	65.630.000,00	60.735.000,00
Sub R	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.410.000,00	4.320.000,00			4.320.000,00	-90.000,00	97,96		
Rincia	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	107.212.018,00	102.812.260,00	0,00	0,00	102.812.260,00	-4.399.758,00	95,90	105.090.480,00	102.546.720,00
Sub R	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	98.590.778,00	94.508.100,00			94.508.100,00	-4.082.678,00	95,86	102.773.040,00	100.229.280,00
Sub R	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.621.240,00	8.304.160,00			8.304.160,00	-317.080,00	96,32	2.317.440,00	2.317.440,00
Rincia	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.798.059,00	7.708.356,00	0,00	0,00	7.708.356,00	-1.089.703,00	87,61	5.539.549,00	5.150.324,00
Sub R	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.798.059,00	7.708.356,00			7.708.356,00	-1.089.703,00	87,61	5.539.549,00	5.150.324,00
Sub R	5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					0,00	0,00	0,00		
Rincia	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	26.945,00	23.733,00	0,00	0,00	23.733,00	-3.212,00	88,08	29.421,00	24.578,00
Sub R	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.151,00	22.394,00			22.394,00	-2.757,00	89,04	28.891,00	24.191,00
Sub R	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.794,00	1.339,00			1.339,00	-455,00	74,64	530,00	387,00
Rincia	5.1.01.01.09	Belanja Jaminan Kesehatan ASN	206.501.963,00	199.090.000,00	0,00	0,00	199.090.000,00	-7.411.963,00	96,41	209.905.508,00	200.157.440,00
Sub R	5.1.01.01.09.0001	Belanja Jaminan Kesehatan PNS	199.090.000,00	199.090.000,00			199.090.000,00	0,00	100,00	209.905.508,00	200.157.440,00
Sub R	5.1.01.01.09.0002	Belanja Jaminan Kesehatan PPPK	8.705.884,00	8.438.444,00			8.438.444,00	-267.440,00	96,93	3.000.000,00	2.393.784,00

Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A6B0433D8A>

Rincia	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.888.362,00	3.741.465,00	0,00	0,00	3.741.465,00	-146.897,00	96,22	4.046.245,00	3.650.238,00
Sub R	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.616.752,00	3.474.589,00			3.474.589,00	-142.163,00	96,07	3.967.495,00	3.604.104,00
Sub R	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	271.610,00	266.876,00			266.876,00	-4.734,00	98,26	78.750,00	46.134,00
Rincia	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.578.310,67	11.224.384,00	0,00	0,00	11.224.384,00	-353.927,00	96,94	11.827.490,00	10.950.712,00
Sub R	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.753.490,00	10.423.768,00			10.423.768,00	-329.722,00	96,93	11.602.490,00	10.812.316,00
Sub R	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	824.820,67	800.616,00			800.616,00	-24.205,00	97,07	225.000,00	138.396,00
Rincia	5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	12.623.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.623.767,00	0,00	12.238.852,00	0,00
Sub R	5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	10.900.323,00	0,00			0,00	-10.900.323,00	0,00	12.011.471,00	
Sub R	5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1.723.444,00	0,00			0,00	-1.723.444,00	0,00	227.381,00	
Objek	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.903.880.992,00	6.653.341.336,00	0,00	0,00	6.653.341.336,00	-250.539.656,00	96,37	6.771.961.269,00	6.535.910.689,00
Rincia	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.867.390.382,00	6.636.981.492,00	0,00	0,00	6.636.981.492,00	-230.408.890,00	96,64	6.660.250.121,00	6.432.656.689,00
Sub R	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.771.069.465,00	6.554.712.505,00			6.554.712.505,00	-216.356.960,00	96,80	6.634.250.371,00	6.412.696.189,00
Sub R	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	96.320.917,00	82.268.987,00			82.268.987,00	-14.051.930,00	85,41	25.999.750,00	19.960.500,00
Rincia	5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	111.711.148,00	103.254.000,00
Sub R	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	20.000.000,00	0,00			0,00	-20.000.000,00	0,00	111.711.148,00	103.254.000,00
Sub R	5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK		0,00			0,00	0,00	0,00		
Rincia	5.1.01.02.06	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	16.490.610,00	16.359.844,00	0,00	0,00	16.359.844,00	-130.766,00	99,21	0,00	0,00
Sub R	5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	16.490.610,00	16.359.844,00			16.359.844,00	-130.766,00	99,21		
Objek	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.029.492,00	323.906.949,00
Rincia	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.588.606,00	304.030.110,00
Sub R	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		0,00			0,00	0,00	0,00	295.559.248,00	288.822.412,00
Sub R	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		0,00			0,00	0,00	0,00	23.029.358,00	15.207.698,00
Rincia	5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.440.886,00	19.876.839,00
Sub R	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		0,00			0,00	0,00	0,00	27.440.886,00	19.876.839,00

Jenis	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.128.560.573,00	3.951.630.588,00	0,00	0,00	3.951.630.588,00	-176.929.985,00	95,71	5.576.239.802,00	5.365.612.417,00
Objek	5.1.02.01	Belanja Barang	820.632.328,00	708.437.582,00	0,00	0,00	708.437.582,00	-112.194.746,00	86,33	507.356.227,00	459.293.719,00
Rincia	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	814.632.328,00	702.776.582,00	0,00	0,00	702.776.582,00	-111.855.746,00	86,27	507.356.227,00	459.293.719,00
Sub R	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.432.600,00	1.105.000,00			1.105.000,00	-327.600,00	77,13	9.245.000,00	9.150.900,00
Sub R	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.726.000,00	4.566.500,00			4.566.500,00	-1.159.500,00	79,75	4.536.000,00	4.327.500,00
Sub R	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.100.000,00	2.637.360,00			2.637.360,00	-462.640,00	85,08	0,00	0,00
Sub R	5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3.559.500,00	1.320.000,00
Sub R	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.241.960,00	2.175.600,00			2.175.600,00	-66.360,00	97,04	11.169.380,00	10.950.200,00
Sub R	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.431.439,00	8.643.696,00			8.643.696,00	-787.743,00	91,65	39.094.025,00	39.076.662,00
Sub R	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.149.254,00	2.149.469,00			2.149.469,00	-269.785,00	88,85	0,00	0,00
Sub R	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	541.141.850,00	442.445.410,00			442.445.410,00	-98.696.440,00	81,76	146.324.000,00	132.251.350,00
Sub R	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	0,00	100,00	6.200.000,00	5.000.000,00
Sub R	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	43.260.000,00	36.375.000,00
Sub R	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	16.048.718,00	15.823.033,00			15.823.033,00	-225.685,00	98,59	53.278.300,00	46.568.152,00
Sub R	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.115.407,00	9.613.230,00			9.613.230,00	-502.177,00	95,04	8.300.700,00	7.808.850,00
Sub R	5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9.550.000,00	9.470.000,00
Sub R	5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	5.335.000,00	4.504.800,00
Sub R	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	5.850.000,00	5.754.240,00			5.754.240,00	-95.760,00	98,36	25.007.400,00	19.746.700,00
Sub R	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25.187.000,00	24.096.145,00			24.096.145,00	-1.090.855,00	95,67	11.128.722,00	10.382.849,00
Sub R	5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	463.500,00	183.150,00			183.150,00	-280.350,00	39,51	0,00	0,00
Sub R	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	38.214.600,00	36.076.388,00			36.076.388,00	-2.138.212,00	94,40	37.493.200,00	32.669.161,00
Sub R	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.260.000,00	144.507.361,00			144.507.361,00	-5.752.639,00	96,17	93.875.000,00	89.691.595,00
Rincia	5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	6.000.000,00	5.661.000,00	0,00	0,00	5.661.000,00	-339.000,00	94,35	0,00	0,00
Sub R	5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lain	6.000.000,00	5.661.000,00			5.661.000,00	-339.000,00	94,35	0,00	0,00
Objek	5.1.02.02	Belanja Jasa	2.179.084.785,00	2.131.813.976,00	0,00	0,00	2.131.813.976,00	-47.270.809,00	97,83	2.016.755.739,00	1.973.320.670,00
Rincia	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.077.139.446,00	2.040.439.881,00	0,00	0,00	2.040.439.881,00	-36.699.565,00	98,23	1.932.395.923,00	1.890.700.854,00
Sub R	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	158.950.000,00	151.750.000,00			151.750.000,00	-7.200.000,00	95,47	138.250.000,00	134.050.000,00
Sub R	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	16.800.000,00	16.800.000,00			16.800.000,00	0,00	100,00	24.000.000,00	20.800.000,00
Sub R	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	484.154.712,00	484.154.712,00			484.154.712,00	0,00	100,00	508.163.051,00	508.163.051,00
Sub R	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	116.555.764,00	116.555.764,00			116.555.764,00	0,00	100,00	111.800.000,00	111.800.000,00
Sub R	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	75.700.000,00	72.493.400,00
Sub R	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	504.820.239,00	504.420.168,00			504.420.168,00	-400.071,00	99,92	474.009.508,00	473.615.484,00
Sub R	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	372.775.885,00	372.447.600,00			372.447.600,00	-328.285,00	99,91	350.768.220,00	350.681.040,00
Sub R	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	72.117.177,00	71.917.176,00			71.917.176,00	-200.001,00	99,72	68.819.644,00	68.781.430,00
Sub R	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	15.325.169,00	5.940.000,00			5.940.000,00	-9.385.169,00	38,76	12.500.000,00	10.940.000,00
Sub R	5.1.02.02.02	Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	19.600.000,00	18.480.000,00			18.480.000,00	-1.120.000,00	94,29	22.260.000,00	21.000.000,00
Sub R	5.1.02.02.03	Jasa Tagihan Telepon	2.700.000,00	2.364.781,00			2.364.781,00	-335.219,00	87,58	3.000.000,00	688.487,00
Sub R	5.1.02.02.04	Jasa Tagihan Listrik									
Sub R	5.1.02.02.05	Jasa Kawat/Faksimili									



A6B0433D8A

tautan berikut <https://sidebar.jabarpov.go.id/v/A6B0433D8A>

Sub R	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	13.792.500,00	12.353.700,00			12.353.700,00	-1.438.800,00	89,57	16.325.500,00	11.005.400,00
Sub R	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	199.260.000,00	183.485.744,00			183.485.744,00	-15.774.256,00	92,08	0,00	0,00
Sub R	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	16.320.000,00	16.185.292,00			16.185.292,00	-134.708,00	99,17	0,00	0,00
Rincia	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	45.435.339,00	45.435.288,00	0,00	0,00	45.435.288,00	-51,00	100,00	47.209.816,00	47.209.816,00
Sub R	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	22.055.991,00	22.055.975,00			22.055.975,00	-16,00	100,00	22.917.392,00	22.917.392,00
Sub R	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.323.357,00	1.323.357,00			1.323.357,00	0,00	100,00	1.375.032,00	1.375.032,00
Sub R	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.654.227,00	1.654.195,00			1.654.195,00	-32,00	100,00	1.718.808,00	1.718.808,00
Sub R	5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	20.401.764,00	20.401.761,00			20.401.761,00	-3,00	100,00	21.198.584,00	21.198.584,00
Rincia	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	28.010.000,00	22.292.307,00	0,00	0,00	22.292.307,00	-5.717.693,00	79,59	23.150.000,00	21.830.000,00
Sub R	5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	28.010.000,00	22.292.307,00			22.292.307,00	-5.717.693,00	79,59	23.150.000,00	21.830.000,00
Rincia	5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	28.500.000,00	23.646.500,00	0,00	0,00	23.646.500,00	-4.853.500,00	82,97	14.000.000,00	13.580.000,00
Sub R	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	28.500.000,00	23.646.500,00			23.646.500,00	-4.853.500,00	82,97	14.000.000,00	13.580.000,00
Objek	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	312.900.000,00	301.528.889,00	0,00	0,00	301.528.889,00	-11.371.111,00	96,37	261.614.000,00	239.174.190,00
Rincia	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	299.568.000,00	288.628.889,00	0,00	0,00	288.628.889,00	-10.939.111,00	96,35	251.614.000,00	239.174.190,00
Sub R	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Ber	242.390.000,00	238.492.935,00			238.492.935,00	-3.897.065,00	98,39		
Sub R	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					0,00	0,00	0,00	191.630.000,00	186.278.250,00
Sub R	5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Peng					0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub R	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.200.000,00	9.728.651,00			9.728.651,00	-2.471.349,00	79,74	9.760.000,00	9.750.240,00
Sub R	5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio					0,00	0,00	0,00	7.424.000,00	7.370.400,00
Sub R	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	18.250.000,00	16.826.003,00			16.826.003,00	-1.423.997,00	92,20		
Sub R	5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	12.928.000,00	12.076.800,00			12.076.800,00	-851.200,00	93,42		
Sub R	5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	13.800.000,00	11.504.500,00			11.504.500,00	-2.295.500,00	83,37	42.800.000,00	35.775.300,00
Rincia	5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.332.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	12.900.000,00	-432.000,00	96,76	10.000.000,00	0,00
Sub R	5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	13.332.000,00	12.900.000,00			12.900.000,00	-432.000,00	96,76	10.000.000,00	
Objek	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	815.943.460,00	809.850.141,00	0,00	0,00	809.850.141,00	-6.093.319,00	99,25	2.790.513.836,00	2.693.823.838,00
Rincia	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	815.943.460,00	809.850.141,00	0,00	0,00	809.850.141,00	-6.093.319,00	99,25	2.790.513.836,00	2.693.823.838,00
Sub R	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	812.123.460,00	806.030.141,00			806.030.141,00	-6.093.319,00	99,25	1.958.071.836,00	1.887.102.440,00
Sub R	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.400.000,00	3.400.000,00			3.400.000,00	0,00	100,00	28.220.000,00	27.710.000,00
Sub R	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	432.736.000,00	420.980.000,00
Sub R	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	420.000,00	420.000,00			420.000,00	0,00	100,00	371.486.000,00	358.031.398,00

Kelon	5.2	BELANJA MODAL	372.666.112,00	341.911.483,00	0,00	0,00	341.911.483,00	-30.754.629,00	91,75	1.404.356.085,00	1.324.312.000,00
Jenis	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	372.666.112,00	341.911.483,00	0,00	0,00	341.911.483,00	-30.754.629,00	91,75	1.404.356.085,00	1.324.312.000,00
Objek	5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.119.600,00	6.592.000,00
Rincia	5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.119.600,00	6.592.000,00
Sub R	5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	7.119.600,00	6.592.000,00
Objek	5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.404.750,00	8.600.000,00
Rincia	5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.404.750,00	8.600.000,00
Sub R	5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	11.404.750,00	8.600.000,00
Objek	5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.070.000,00
Rincia	5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.070.000,00
Sub R	5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.070.000,00
Objek	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	112.671.912,00	100.921.805,00	0,00	0,00	100.921.805,00	-11.750.107,00	89,57	370.852.285,00	334.001.000,00
Rincia	5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	21.053.112,00	19.872.330,00	0,00	0,00	19.872.330,00	-1.180.782,00	94,39	143.187.620,00	131.100.000,00
Sub R	5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	7.696.500,00	7.500.000,00
Sub R	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	21.053.112,00	19.872.330,00			19.872.330,00	-1.180.782,00	94,39	135.491.120,00	123.600.000,00
Rincia	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	89.618.800,00	79.495.475,00	0,00	0,00	79.495.475,00	-10.123.325,00	88,70	209.090.165,00	184.341.000,00
Sub R	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	77.481.600,00	70.929.000,00			70.929.000,00	-6.552.600,00	91,54	142.489.500,00	131.895.000,00
Sub R	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.137.200,00	8.566.475,00			8.566.475,00	-3.570.725,00	70,58	57.492.350,00	52.446.000,00
Sub R	5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9.108.315,00	0,00
Rincia	5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.000.000,00	1.554.000,00	0,00	0,00	1.554.000,00	-446.000,00	77,70	18.574.500,00	18.560.000,00
Sub R	5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangn Pejabat	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	18.574.500,00	18.560.000,00
Sub R	5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	2.000.000,00	1.554.000,00			1.554.000,00	-446.000,00	77,70	0,00	0,00
Objek	5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.500.000,00	3.799.998,00	0,00	0,00	3.799.998,00	-700.002,00	84,44	235.942.250,00	227.149.000,00
Rincia	5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	4.500.000,00	3.799.998,00	0,00	0,00	3.799.998,00	-700.002,00	84,44	73.805.150,00	70.100.000,00
Sub R	5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4.500.000,00	3.799.998,00			3.799.998,00	-700.002,00	84,44	0,00	0,00
Sub R	5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	42.698.750,00	39.600.000,00
Sub R	5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	31.106.400,00	30.500.000,00
Rincia	5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.137.100,00	157.049.000,00
Sub R	5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	162.137.100,00	157.049.000,00
Objek	5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.550.000,00	2.829.000,00	0,00	0,00	2.829.000,00	-721.000,00	79,69	0,00	0,00
Rincia	5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.550.000,00	2.829.000,00	0,00	0,00	2.829.000,00	-721.000,00	79,69	0,00	0,00
Sub R	5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Objek	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



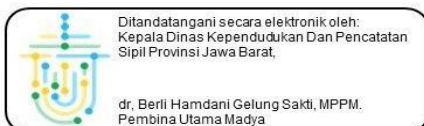
A6B0433D8A

tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A6B0433D8A>

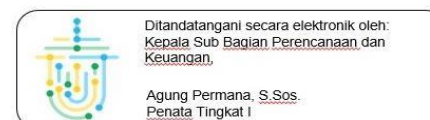
Rincia	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	222.600.000,00	209.000.000,00	0,00	0,00	209.000.000,00	-13.600.000,00	93,89	448.166.500,00	433.600.000,00
Sub R	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	448.166.500,00	433.600.000,00
Sub R	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	222.600.000,00	209.000.000,00			209.000.000,00	-13.600.000,00	93,89	0,00	0,00
Rincia	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	29.344.200,00	25.360.680,00	0,00	0,00	25.360.680,00	-3.983.520,00	86,42	328.770.700,00	312.300.000,00
Sub R	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	22.800.000,00	22.000.000,00
Sub R	5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	22.817.000,00	20.410.680,00			20.410.680,00	-2.406.320,00	89,45	0,00	0,00
Sub R	5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6.527.200,00	4.950.000,00			4.950.000,00	-1.577.200,00	75,84	305.970.700,00	290.300.000,00
SILPA		SILPA	-14.034.884.163,00	-13.478.789.125,00	0,00	0,00	-13.478.789.125,00	556.095.038,00	96,04	-16.784.375.039,00	-16.091.638.279,00

MENGETAHUI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN



A6B0433D8A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A6B0433D8A>

tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A6B0433D8A>

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DAFTAR PERSEDIAAN
31 DECEMBER 2025

Level Akun	Kodering Persediaan Neraca	Uraian Persediaan Neraca	Saldo Awal Persediaan	Koreksi Ekuitas (Koreksi Kurang)	Koreksi Ekuitas (Koreksi Tambah)	Saldo Awal Persediaan Setelah Koreksi	Belanja LRA Tahun Berjalan	Pemakaian Persediaan Tahun Berjalan	Persediaan (Usang/Rusak) Tahun Berjalan	Kapitalisasi Menjadi Aset Tetap	Belanja Persediaan Menjadi Beban Barang dan Jasa selain Persediaan	Penyerahan Kepada Pihak Ketiga	Hibah Keluar	Dari Kegiatan Operasional (Surplus Persediaan)	Jumlah Pengurangan	Saldo Akhir Persediaan
TOTAL PERSEDIAAN			16.853.850,00	0,00	0,00	16.853.850,00	702.776.582,00	681.591.342,00	0,00	24.096.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.687.487,00	13.942.945,00
objek 1.1.12.01	BARANG PAKAI HABIS		16.853.850,00	0,00	0,00	16.853.850,00	702.776.582,00	681.591.342,00	0,00	24.096.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.687.487,00	13.942.945,00
rincia 1.1.12.01.01	BAHAN		16.853.850,00	0,00	0,00	16.853.850,00	702.776.582,00	681.591.342,00	0,00	24.096.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.687.487,00	13.942.945,00
sub_r 1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan Dan Konstruksi					0,00	1.105.000,00	510.000,00							510.000,00	595.000,00
sub_r 1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar Dan Pelumas					0,00	4.566.500,00	4.566.500,00							4.566.500,00	0,00
sub_r 1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman					0,00	2.637.360,00	2.637.360,00							2.637.360,00	0,00
sub_r 1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya					0,00	2.175.600,00	2.175.600,00							2.175.600,00	0,00
sub_r 1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor					0,00	8.643.696,00	6.930.491,00							6.930.491,00	1.713.205,00
sub_r 1.1.12.01.03.0002	Kertas Dan Cover					0,00	2.149.469,00	2.149.469,00							2.149.469,00	0,00
sub_r 1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak					0,00	442.445.410,00	442.220.413,00							442.220.413,00	224.997,00
sub_r 1.1.12.01.03.0004	Benda Pos					0,00	3.000.000,00	3.000.000,00							3.000.000,00	0,00
sub_r 1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor					0,00	15.823.033,00	15.823.033,00							15.823.033,00	0,00
sub_r 1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik		7.808.850,00			7.808.850,00	9.613.230,00	17.422.080,00							17.422.080,00	0,00
sub_r 1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata		7.650.000,00			7.650.000,00	5.754.240,00	13.404.240,00							13.404.240,00	0,00
sub_r 1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya					0,00	24.096.145,00			24.096.145,00					24.096.145,00	0,00
sub_r 1.1.12.01.04.0002	Obat-Obatan Lainnya					0,00	183.150,00	183.150,00							183.150,00	0,00
sub_r 1.1.12.01.07.0001	Natura		1.395.000,00			1.395.000,00	36.076.388,00	26.061.645,00							26.061.645,00	11.409.743,00
sub_r 1.1.12.01.07.0001	Natura					0,00	144.507.361,00	144.507.361,00							144.507.361,00	0,00

MENGETAHUI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Provinsi Jawa Barat,

dr. Berli Hamdani Gelung Sakti, MPPM,
Pembina Utama Madya

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan,

Agung Permana, S.Sos.,
Penata Tingkat I



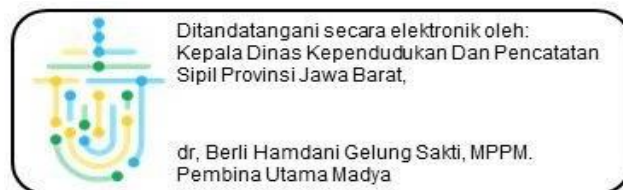
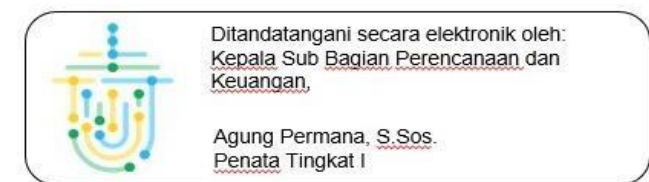
A6B0433D8A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses
tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A6B0433D8A>

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
31 DECEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

NO	JENIS ASET TETAP	SALDO AWAL 2025 (Rp)	MUTASI		SALDO AKHIR PER 31- Dec-2025 (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN SD 31-Dec-2025 (Rp)	NILAI BUKU PER 31-Dec-2025 (Rp)
			BERTAMBAH	BERKURANG			
			(Rp)	(Rp)			
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)	7	8=(6-7)
1	TANAH	5.138.640.000,00	0,00	0,00	5.138.640.000,00	0,00	5.138.640.000,00
							0,00
2	PERALATAN DAN MESIN	9.327.823.834,00	358.107.068,00	0,00	9.685.930.902,00	8.072.271.035,00	1.613.659.867,00
							0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	5.354.291.538,00	0,00	0,00	5.354.291.538,00	5.099.261.600,00	255.029.938,00
							0,00
4	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	67.202.000,00	0,00	0,00	67.202.000,00	41.438.304,00	25.763.696,00
							0,00
5	ASET TETAP LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00
6	KONSTRUKSI DALAM PENGKERJAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00
	JUMLAH	19.887.957.372,00	358.107.068,00	0,00	20.246.064.440,00	13.212.970.939,00	7.033.093.501,00

MENGETAHUI**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL****KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

A6B0433D8A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
 Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses
 tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A6B0433D8A>

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DAFTAR RINCIAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
31 DECEMBER 2025

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

(Dalam Rupiah)

No	KETERANGAN	Saldo Awal 2025	Realisasi Belanja Modal di LRA TA 2025	Realisasi Belanja Modal dari Jenis Aset Tetap yang lain yang menjadi aset tetap Bersangkutan TA.2025	Realisasi Belanja Persediaan yang menjadi Aset Tetap Tahun 2025	Realisasi Belanja Modal dari Jenis Aset Tetap Bersangkutan yang menjadi Persediaan TA.2025	Realisasi Belanja Modal yang menjadi Jenis Aset Tetap yang sebenarnya TA.2025	Belanja Modal TA. 2025 yang tidak di Kapitalisasi (Tidak menjadi Aset Tetap)	Belanja Modal TA.2025 yang Menjadi Aset Tetap	Mutasi Tambah								Mutasi Kurang								Saldo Akhir per 31-Dec-2025	Akumulasi Penyusutan ad 31-Dec-2025	Nilai Buku Per 31-Dec-2025		
										Penerimaan dari OPD lain (Mutasi Masuk antar OPD)	Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan dan belanja Jasa	Koreksi Pencatatan	Reklasifikasi dari Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Masuk)	Reklasifikasi dari Jenis Persediaan (Reklasifikasi Masuk)	Hibah/engakuan Penerimaan Lainnya yang Sah	Utang Aset Tetap 2025	Jumlah	Penghapusan	Penerimaan Aset Tetap ke OPD Lain (Mutasi Keluar antar OPD)	Koreksi Pencatatan	Reklasifikasi ke Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Keluar)	Reklasifikasi ke Persediaan (Reklasifikasi Keluar)	Hibah/engakuan Pengeluaran Lainnya yang Sah	Utang Aset Tetap 2024	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(5+6+7+8)	10	11=(9-10)	12	13	14	15	16	17	18	19=(12+13+14+15+16+17+18)	20	21	22	23	24	25	26	27	28=(19-27)	29	30=(28-29)	
1	TANAH	5.138.640.000,00	0,00					0,00		0,00								0,00								0,00	5.138.640.000,00	0,00	5.138.640.000,00	
2	PERALATAN DAN MESIN	9.327.823.934,00	341.911.483,00		24.096.145,00			366.007.628,00	13.561.560,00	352.446.068,00		5.661.000,00						358.107.068,00								0,00	9.685.930.902,00	8.072.271.035,00	1.613.659.867,00	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	5.354.291.538,00	0,00					0,00		0,00								0,00								0,00	5.354.291.538,00	5.099.261.600,00	255.029.938,00	
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	67.202.000,00	0,00					0,00		0,00								0,00								0,00	67.202.000,00	41.438.304,00	25.763.696,00	
5	ASET TETAP LAINNYA	0,00	0,00					0,00		0,00								0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
6	KONTRUKSI DALAM PENERJAAN	0,00						0,00		0,00								0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH ASET TETAP	19.887.957.372,00	341.911.483,00	0,00	24.096.145,00	0,00	0,00	366.007.628,00	13.561.560,00	352.446.068,00	0,00	5.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.107.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.246.064.440,00	13.212.970.939,00	7.033.093.501,00	
								0,00		0,00								0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
	ASET LAINNYA - ASET TAK BERWUJUD							0,00		0,00								0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
	ASET LAINNYA - ASET LAIN - LAIN							0,00		0,00								0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH	0,00	341.911.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.446.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KETERANGAN UNTUK BELANJA MODAL YANG TIDAK DIKAPITALISASI																									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERSEDIAAN							0,00		0,00																	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEBAN JASA							0,00		0,00																	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEBAN PEMELIHARAAN							0,00		0,00																	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEBAN LAIN-LAIN							0,00	13.561.560,00	13.561.560,00																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	13.561.560,00	13.561.560,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00

MENGETAHUI
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat,
di: Berek Hamdan Gahung Sarik, MPPM,
Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,
Agung Permana S.Sos,
Pemerintah Tingkat I



A6B0433D8A

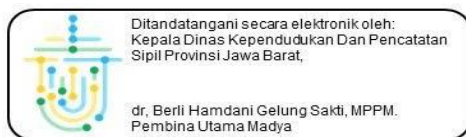
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A6B0433D8A>

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DAFTAR MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TEAP
31 DECEMBER 2025

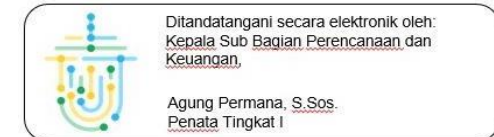
NO	AKUMULASI PENYUSUTAN	SALDO AWAL 2025 (Rp)	PENAMBAHAN						PENGURANGAN						SALDO AKHIR PER 31- Dec-2025 (Rp)
			KOREKSI	MUTASI MASUK	REKLASIFI KASI	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	Hibah/Peng akuan Penerimaan Lainnya yang Sah	JUMLAH	KOREKSI	MUTASI KELUAR	REKLASIFI KASI	PENGHAP USAN	Hibah/Peng akuan Pengeluara n Lainnya yang Sah	JUMLAH	
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4+5+6+7+8	10	11	12	13	14	10+11+12+13+14	16 = 3+9-15
1	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	7.457.375.661,00				614.895.374,00		614.895.374,00						0,00	8.072.271.035,00
2	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	5.060.218.772,00				39.042.828,00		39.042.828,00						0,00	5.099.261.600,00
3	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	38.078.172,00				3.360.132,00		3.360.132,00						0,00	41.438.304,00
4	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	0,00				0,00		0,00						0,00	0,00
	JUMLAH	12.555.672.605,00	0,00	0,00	0,00	657.298.334,00	0,00	657.298.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.212.970.939,00
	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA					0,00		0,00						0,00	0,00
	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP DAN ASET LAINNYA	12.555.672.605,00	0,00	0,00	0,00	657.298.334,00	0,00	657.298.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.212.970.939,00

MENGETAHUI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN



A6B0433D8A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
 Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses
 tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A6B0433D8A>

PROVINSI JAWA BARAT
LAPORAN KETERKATAN LRA, LO, DAN NERACA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
31 DECEMBER 2025

Kode Rekening LO	URAIAN LRA	Belanja LRA TA.2025	BERTAMBAH										JUMLAH BERTAMBAH	BERKURANG								JUMLAH BERKURANG	BEBAN TAHUN 2025	BEBAN TAHUN 2024
			NILAI BEBAN DIBAYAR DIMUKA T-1 yang menjadi Beban Tahun berjalan	REKLA SIFIKASI KELUAR BERANG DAN JASABLUD	REKLA SIFIKASI MASUK BERANG DAN JASABOS	REKLA SIFIKASI MASUK ANTAR BEBAN	HIBAH KELUAR	BELANJAMODAL YANG TIDAK DIKAPITALISASI	Adminis trasi Jasa Bank RS	SALDO KEWAJIBAN TAHUN LAPORAN	BEBAN PENUR UNAN NILAI INVEST ASI	SALDO KEWAJIBAN T-1		NILAI BEBAN DIBAYAR DIMUKA Tahun Berjalan, yang menjadi Beban di tahun depan dst	BELAN JA YANG MENJADI PERSEDIAAN	KAPITALISASI MENJADI ASET	PIUTANG BAGI HASIL KE KABUPATEN/KOTA	REKLA SIFIKASI KELUAR ANTAR BEBAN	REKLA SIFIKASI KELUAR BERANG DAN JASABLUD	REKLA SIFIKASI BEBAN MENJADI PIUTANG				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12	14	15	16	17	18	19	20	21	22 = 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21	23	24	
	BEBAN PEGAWAI																							
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.531.905.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531.905.718,00	2.541.896.224,00	
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	6.653.341.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653.341.336,00	6.535.910.689,00	
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.906.949,00	
	JUMLAH BEBAN PEGAWAI	9.185.247.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.185.247.054,00	9.401.713.862,00	
	BEBAN JASA																							
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	2.040.439.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012.815,00	0,00	6.012.815,00	7.723.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.723.742,00	2.038.728.954,00	1.890.346.815,00
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	45.435.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.435.288,00	47.209.816,00	
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	22.292.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.292.307,00	21.830.000,00	
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	23.646.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.646.500,00	13.580.000,00	
	JUMLAH BEBAN JASA	2.131.813.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.012.815,00	0,00	6.012.815,00	7.723.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.723.742,00	2.130.103.049,00	1.972.966.631,00
	BEBAN PEMELIHARAAN																							
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	288.628.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.628.889,00	239.174.190,00	
	JUMLAH BEBAN PEMELIHARAAN	301.528.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.528.889,00	239.174.190,00	
	BEBAN PERJALANAN DINAS																							
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	809.850.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.850.141,00	2.693.823.838,00	
	JUMLAH BEBAN PERJALANAN DINAS	809.850.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.850.141,00	2.693.823.838,00	
	BEBAN LAIN - LAIN																							
8.1.02.01.04	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	5.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.561.560,00	0,00	0,00	0,00	13.561.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661.000,00	13.561.560,00	2.255.000,00
8.3.01.01	Beban Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH BEBAN LAIN-LAIN	5.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.561.560,00	0,00	0,00	0,00	13.561.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661.000,00	13.561.560,00	2.255.000,00
	TOTAL	12.434.101.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.561.560,00	0,00	6.012.815,00	0,00	19.574.375,00	7.723.742,00	0,00	0,00	0,00	5.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.384.742,00	12.440.290.693,00	14.309.933.521,00

MENGETAHUI
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

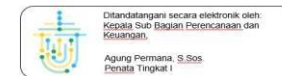
dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.
NIP. 19661020 199803 1 003

AGUNG PERMANA, S.Sos.
NIP. 19750101 200801 1 007



A6B0433D8A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A6B0433D8A>



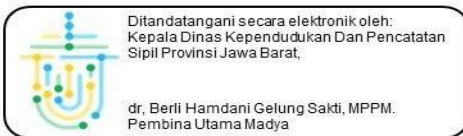
A6B0433D8A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A6B0433D8A>

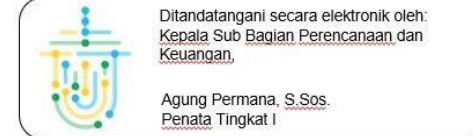
Level Akun	Koderin g LRA	Uraian Belanja LRA	Koderin g Persediaan Neraca	Uraian Persediaan Neraca	Kodering	Beban - LO	Saldo Akhir Persediaan Tahun Berjalan	Pemakaian Persediaan Tahun Berjalan	Persediaan (Usang/Rusak) Tahun Berjalan	Penyerahan Kepada Pihak Ketiga	Beban Persediaan Tahun Berjalan	Beban Persediaan T-1
						Total Beban Persediaan	13.942.945,00	681.591.342,00	0,00	0,00	681.591.342,00	455.289.469,00
objek	5.1.02.01	Belanja	1.1.12.01	BARANG	8.1.02.01	Beban Barang	13.942.945,00	681.591.342,00	0,00	0,00	681.591.342,00	455.289.469,00
rincian	5.1.02.01	Belanja	1.1.12.01	BAHAN	8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	13.942.945,00	681.591.342,00	0,00	0,00	681.591.342,00	455.289.469,00
sub_ri	5.1.02.01	Belanja	1.1.12.01	Bahan Ba	8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	595.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	10.765.000,00
sub_ri	5.1.02.01	Belanja	1.1.12.01	Bahan Ba	8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	4.566.500,00	0,00	0,00	4.566.500,00	4.327.500,00
sub_ri	5.1.02.01	Belanja	1.1.12.01	Bahan/Bi	8.1.02.01.01.0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	2.637.360,00	0,00	0,00	2.637.360,00	
sub_ri	5.1.02.01	Belanja	1.1.12.01	Isi Tabun	8.1.02.01.01.0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
sub_ri	5.1.02.01	Belanja	1.1.12.01	Bahan La	8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	0,00	2.175.600,00	0,00	0,00	2.175.600,00	10.950.200,00
sub_ri	5.1.02.01	Belanja	1.1.12.01	Alat Tulis	8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.713.205,00	6.930.491,00	0,00	0,00	6.930.491,00	40.093.662,00
sub_ri	5.1.02.01	Belanja	1.1.12.01	Kertas D	8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	2.149.469,00	0,00	0,00	2.149.469,00	
sub_ri	5.1.02.01	Belanja	1.1.12.01	Bahan Ce	8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	224.997,00	442.220.413,00	0,00	0,00	442.220.413,00	132.251.350,00
sub_ri	5.1.02.01	Belanja	1.1.12.01	Benda Po	8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	5.000.000,00
sub_ri	5.1.02.01	Belanja	1.1.12.01	Bahan Ko	8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.375.000,00
sub_ri	5.1.02.01	Belanja	1.1.12.01	Perabot	8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	15.823.033,00	0,00	0,00	15.823.033,00	46.568.152,00
sub_ri	5.1.02.01	Belanja	1.1.12.01	Alat Listr	8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	17.422.080,00	0,00	0,00	17.422.080,00	10.050.000,00
sub_ri	5.1.02.01	Belanja	1.1.12.01	Perlengk	8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470.000,00
sub_ri	5.1.02.01	Belanja	1.1.12.01	Perlengk	8.1.02.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504.800,00
sub_ri	5.1.02.01	Belanja	1.1.12.01	Suvenir/	8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	13.404.240,00	0,00	0,00	13.404.240,00	12.096.700,00
sub_ri	5.1.02.01	Belanja	1.1.12.01	Alat/Bah	8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.382.849,00
sub_ri	5.1.02.01	Belanja	1.1.12.01	Obat-Ob	8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	183.150,00	0,00	0,00	183.150,00	
sub_ri	5.1.02.01	Belanja	1.1.12.01	Natura	8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	11.409.743,00	26.061.645,00	0,00	0,00	26.061.645,00	31.274.161,00
sub_ri	5.1.02.01	Belanja	1.1.12.01	Natura	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	0,00	144.507.361,00	0,00	0,00	144.507.361,00	89.860.095,00

MENGETAHUI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL



KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN



A6B0433D8A

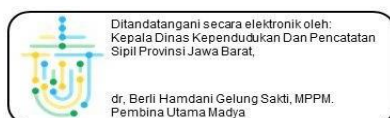
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A6B0433D8A>

PROVINSI JAWA BARAT
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI SERTA BEBAN PENYISIHAN PIUTANG
31 DECEMBER 2025

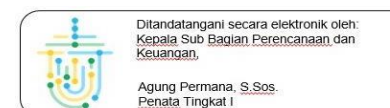
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

URAIAN	BEBAN TAHUN 2025	BEBAN TAHUN 2024
1	2	3
A. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		
A.1 BEBAN PENYUSUTAN		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	614.895.374	461.055.756
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	39.042.828	54.052.921
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.360.132	3.360.132
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0
Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0	0
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	0	0
Beban Penyusutan Properti Investasi	0	0
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN	657.298.334	518.468.809
A.2. BEBAN AMORTISASI		
Beban Amortisasi	0	0
JUMLAH BEBAN AMORTISASI	0	0
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	657.298.334	518.468.809

MENGETAHUI
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A6B0433D8A>



A6B0433D8A

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL NERACA DAN LRA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PER 31 December 2025

NO	URAIAN	LRA	NERACA	SELISIH	KETERANGAN
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)
1	TANAH	-	-	-	
2	PERALATAN DAN MESIN	341.911.483,00	352.446.068,00	(10.534.585,00)	Penambahan dari Persediaan yang menjadi Asset Tetap
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	-	
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	-	-	-	
5	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-	
7	ASET LAINNYA	-	-	-	
JUMLAH		341.911.483,00	352.446.068,00	(10.534.585,00)	

Mengetahui,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Provinsi Jawa Barat,

dr. Berli Hamdani Gelung Sakti, MPPM.
Pembina Utama Madya

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan,

Agung Permana, S.Sos.
Penata Tingkat I



A6B0433D8A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A6B0433D8A>